



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN Kuantan Singingi

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau”.

LKIP ini menyajikan capaian evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja. Pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis tersebut memuat informasi terkait pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja, penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Akhir kata, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan perbaikan kinerja di Tahun 2025. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan terus melakukan perbaikan dalam kinerjanya secara efektif, efisien dan berkesinambungan.



Teluk Kuantan, 25 Maret 2025
Bupati Kuantan Singingi,

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)”. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Analisis Akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 15 Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU), Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 telah berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap IKU sasaran pada masing-masing sasaran berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 15 sasaran dan 23 IKU disimpulkan 22 IKU capaiannya Sangat Baik, 1 IKU capaiannya Baik. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian indikator tahun 2024 adalah sebesar **97,18%** dengan Skala nilai peringkat kinerja pada indikator ini **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, didukung oleh beberapa faktor internal maupun dukungan faktor eksternal dalam wujud kerjasama dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan dapat diminimalkan dampaknya dengan melakukan beberapa upaya solutif untuk mencapai hasil yang optimal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	2
1.3.2 Data Kepegawaian.....	5
1.3.3 Isu Strategis	8
BAB II Perencanaan Kinerja	10
2.1 RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi.....	10
2.1.1 Pernyataan Visi.....	10
2.1.2 Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	13
2.1.3 Tujuan dan Saran.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja	18
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	23
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	24
3.2 Realisasi Anggaran	73
3.2.1 Pendapatan Daerah.....	74
3.2.2 Belanja Daerah	74
3.3 Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran	75
3.3.1 Laporan Keuangan.....	75
BAB IV Penutup.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	5
Gambar 2.1	Keselaran Visi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025, Visi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan Visi RPJMD Tahun 2020-2024	12
Gambar 3.1	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 1.....	31
Gambar 3.2	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 2.....	33
Gambar 3.3	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 3.....	35
Gambar 3.4	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 4.....	37
Gambar 3.5	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 5.....	39
Gambar 3.6	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 6.....	41
Gambar 3.7	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator.....	44
Gambar 3.8	Grafik Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024	45



Gambar 3.9	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 8.....	46
Gambar 3.10	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 9.....	48
Gambar 3.11	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi , 2020-2024 (tahun)	49
Gambar 3.12	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 10.....	50
Gambar 3.13	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 11.....	52
Gambar 3.14	Perkembangan IPM, IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, dan IPG di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2025	54
Gambar 3.15	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator	55
Gambar 3.16	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 13.....	56
Gambar 3.17	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 14.....	57
Gambar 3.18	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020-2024	60
Gambar 3.19	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 15.....	60



Gambar 3.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dan 2024	62
Gambar 3.21	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 16.....	62
Gambar 3.22	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 17.....	63
Gambar 3.23	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 18.....	65
Gambar 3.24	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 19.....	66
Gambar 3.25	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 20.....	68
Gambar 3.26	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 21.....	69
Gambar 3.27	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 22.....	71
Gambar 3.28	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Indikator 23.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	6
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024	7
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	7
Tabel 1.6	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024	7
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024	8
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024.....	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Penilaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	26



Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2025.....	28
Tabel 3.4	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	75





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah , Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik.
- b. Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga.
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.



3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
11. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, dan bidang pangan.
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan perkebunan dan peternakan.
13. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

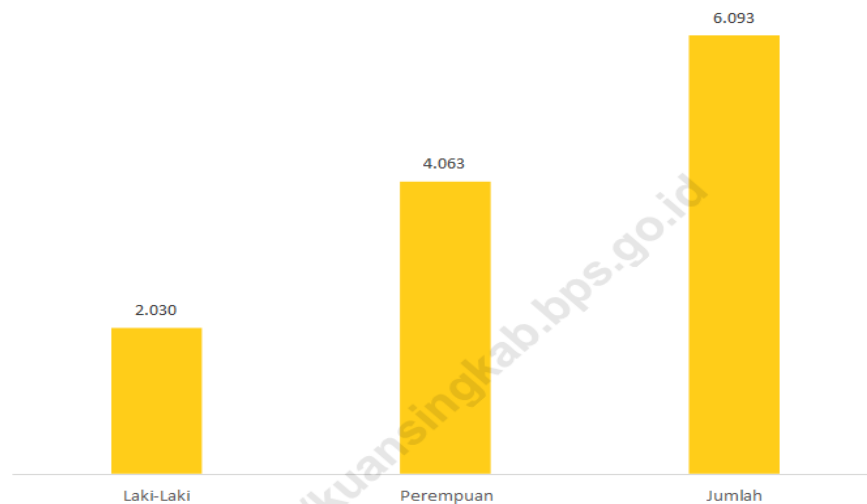


15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.
 18. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
 19. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kuantan Tengah, Tipe A;



2. Kecamatan Kuantan Mudik, Tipe A;
3. Kecamatan Hulu Kuantan, Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Toar, Tipe A;
5. Kecamatan Pucuk Rantau, Tipe A;
6. Kecamatan Sentajo Raya, Tipe A;
7. Kecamatan Benai, Tipe A;
8. Kecamatan Pangean, Tipe A;
9. Kecamatan Logas Tanah Darat, Tipe A;
10. Kecamatan Kuantan Hilir, Tipe A;
11. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Tipe A;
12. Kecamatan Inuman, Tipe A;
13. Kecamatan Cerenti, Tipe A;
14. Singingi, Tipe A;
15. Kecamatan Singingi Hilir, Tipe A;

1.3.2 Data Kepegawaian



Gambar 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
(Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

Jabatan Occupation	Pegawai Negeri Sipil Government Employee		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	29	—	29
Administrator / Administrator	108	28	136
Pengawas / Supervisor	163	122	285
Eselon V/5 th Echelon	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	—	1	1
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	643	1.350	1.993
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	180	855	1.035
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	202	157	359
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	208	347	555
Jumlah/Total	1.533	2.860	4.393

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

Senior Executives			
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	—	—	—
Administrator / Administrator	—	—	—
Pengawas / Supervisor	—	—	—
Eselon V/5 th Echelon	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	—	—	—
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	436	1.013	1.449
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	29	180	209
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	32	10	42
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	—	—	—
Jumlah/Total	497	1.203	1.700

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

Jabatan Occupation	Aparatur Sipil Negara State Civil Service		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(8)	(9)	(10)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	29	—	29
Administrator / Administrator	108	28	136
Pengawas / Supervisor	163	122	285
Eselon V/5 th Echelon	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	—	1	1
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	1.079	2.363	3.442
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	209	1.035	1.244
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	234	167	401
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	208	347	555
Jumlah/Total	2.030	4.063	6.093

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

Tingkat Pendidikan Educational Level	Pegawai Negeri Sipil Government Employee		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD) Primary School	9	2	11
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School	10	1	11
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	278	187	465
Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I	1	3	4
Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II	42	90	132
Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III	135	394	529
Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV	20	210	230
S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	1.021	1.691	2.712
S2/Pasca Sarjana Graduate	149	144	293
S3/Doktor/Ph.D Post Graduate	—	6	6
Jumlah/Total	1.665	2.728	4.393

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang),
Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

Tingkat Pendidikan Educational Level	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja State Employees with Employment Agreements		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Dasar (SD) Primary School	—	—	—
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School	—	—	—
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	4	12	16
Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I	—	—	—
Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II	—	—	—
Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III	18	136	154
Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV	1	4	5
S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	457	1.032	1.489
S2/Pasca Sarjana Graduate	9	27	36
S3/Doktor/Ph.D Post Graduate	—	—	—
Jumlah/Total	489	1.211	1.700

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

Sekolah Dasar (SD) Primary School	9	2	11
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School	10	1	11
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	282	199	481
Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I	1	3	4
Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II	42	90	132
Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III	153	530	683
Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV	21	214	235
S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	1.478	2.723	4.201
S2/Pasca Sarjana Graduate	158	171	329
S3/Doktor/Ph.D Post Graduate	—	6	6
Jumlah/Total	2.154	3.939	6.093

Tabel 1.6
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang),
Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I	9	2	11
1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	1	—	—
2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	—	—	—
3. I/C (Juru/Clerk)	3	1	—
4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	5	1	—
Golongan II/Range II	261	224	485
5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	11	1	—
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	4	23	—
7. II/C (Pengatur/Supervisor)	172	91	—
8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	74	109	—
Golongan III/Range III	1.721	975	2.696
9. III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	301	185	—
10. III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	411	234	—
11. III/C (Penata/Superintendent)	353	174	—
12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	656	382	—
Golongan IV/Range IV	745	456	1.201
13. IV/A (Pembina/Administrator)	309	214	—
14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	372	176	—
15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	64	66	—
16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	—	—	—
17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	—	—	—
Jumlah/Total	2.736	1.657	4.393

Tabel 1.7

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	—	—	—
II	—	—	—
III	—	—	—
IV	—	—	—
V	12	4	16
VI	—	—	—
VII	18	136	154
VIII	—	—	—
IX	459	1.035	1.494
X	8	27	35
XI	1	—	1
XII	—	—	—
XIII	—	—	—
XIV	—	—	—
XV	—	—	—
XVI	—	—	—
XVII	—	—	—
Jumlah/Total	498	1.202	1.700

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024 (Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi)

1.3.3 Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam RKPD Tahun 2024 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat 4 (empat) isu strategis pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

Isu strategis daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah :

1. Percepatan pembangunan manusia dengan : peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan



berupa program UHC, kesetaraan gender, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi;

2. Peningkatan pemberdayaan pemangku adat dan lembaga adat, berupa peningkatan peran serta pemangku adat dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Peningkatan layanan infrastruktur berupa : kondisi jalan dan jembatan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan penyelesaian Perda RTRW;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, ketahanan pangan, produksi perkebunan, produksi hasil peternakan dan perikanan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan secara ringkas Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

“VISI”

Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau

“MISI”

2.1.1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)”



Adapun makna pernyataan visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut :

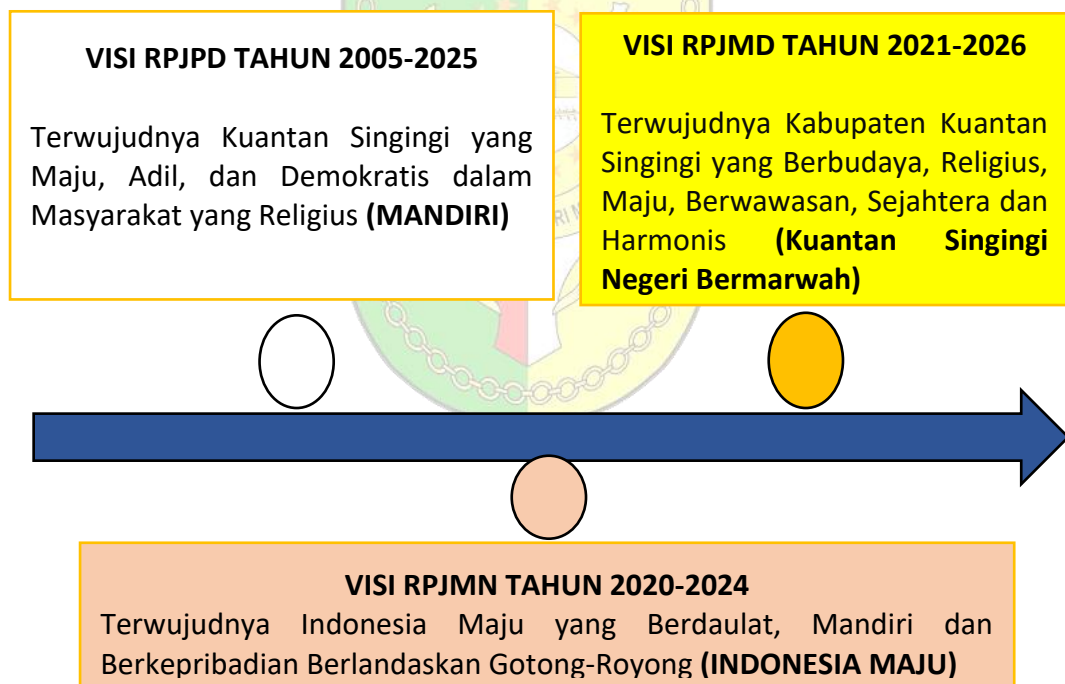
1. **BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan local;
2. **RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. **MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan



sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Keselarasan visi antara visi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, visi RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 2.1

Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025, Visi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan Visi RPJMN Tahun 2020-2024



2.1.2. Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :



Misi 1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.



Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Mewujudkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

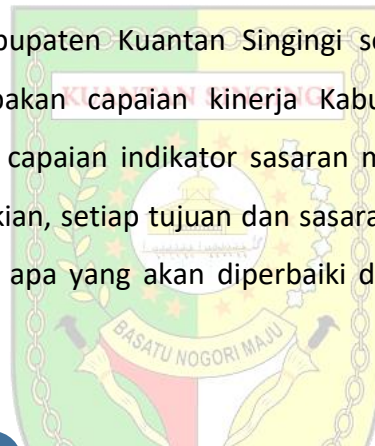
Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan harapan masyarakat yang akan diwujudkan atau dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan **KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH**. Dalam upaya untuk mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.



Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD.

Sasaran RPJMD selain menterjemahkan visi, misi dan tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih juga mesti selaras dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat (2020-2025), hal ini dimaksudkan menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya, dimana capaian indikator tujuan merupakan capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026.



MISI 1

- Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau

TUJUAN

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai religious serta melestarikan budaya daerah

SASARAN

- Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, nyaman penuh kebersamaan dengan kehidupan yang agamis
- Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah



MISI 2

- Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis

TUJUAN

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

SASARAN

- Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

MISI 3

- Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing

TUJUAN

- Meningkatkan kualitas pembangunan manusia

SASARAN

- Meningkatkan kualitas pendidikan
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pemuda



MISI 4

- Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sector unggulan daerah

TUJUAN

- Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing

SASARAN

- Menciptakan kemandirian, mempercepat laju pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi
- Menekan angka kemiskinan dan pengangguran

MISI 5

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegritasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

TUJUAN

- Meningkatkan kualitas infrastruktur
- Meningkatkan infrastruktur permukiman

SASARAN

- Meningkatkan konektivitas daerah
- Menekan angka kemiskinan dan pengangguran
- Meningkatkan infrastruktur pemerintah
- Meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya air
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup



2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan RPJMD dan RKPD Perubahan Tahun 2024, berikut Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.1**

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2024**

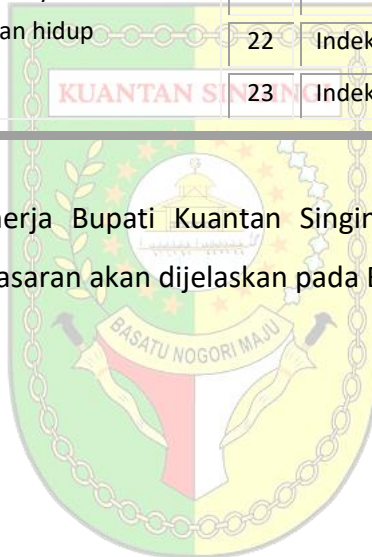
NO	MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	1	Indeks ketertiban dan ketentraman umum (poin)	100,00
2		Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	2	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (Persen)	96
3	2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3	Opini BPK RI (Predikat)	WTP
			4	Nilai AKIP (Poin)	66,2
			5	Skor LPPD (Skor)	3,00
4		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	6	Indeks SPBE (Poin)	3,00
			7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	87,00
5	3	Meningkatnya kualitas pendidikan	8	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,01
			9	Harapan lama sekolah (Tahun)	13,42
6		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,16
7		Meningkatnya pengarusutamaan gender	11	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	96,9
8	4	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	12	PDRB ADHB (Rp juta)	50,029,80
			13	Gini Ratio	0,215-0,241
9		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	14	Persentase penduduk miskin (%)	7,55-8,00
			15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,15-2,67
10	5	Meningkatnya pelayanan transportasi	16	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal (%)	6,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

11	Meningkatnya infrastruktur permukiman	17	Persentase lingkungan sehat yang di dukung dengan PSU (%)	100
12	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	18	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	95,63
13	Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	19	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	94,45
14	Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	20	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik (%)	94,85
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	21	Indeks kualitas air (Poin)	59,45
		22	Indeks kualitas udara (Poin)	94,65
		23	Indeks kualitas lahan (Poin)	55,09

Dokumen perjanjian kinerja Bupati Kuantan Singingi disajikan dalam Lampiran 1, capaian masing-masing Sasaran akan dijelaskan pada Bab III.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2	PERGESERAN 3	PERGESERAN 4	PERGESERAN 5	PERGESERAN 6	PERGESERAN 7	PERGESERAN 8	PERGESERAN 9	Bertambah / Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH	1,507,149,074,087.00	1,507,149,074,087.00	1,507,149,074,087.00	1,518,625,078,981.00	1,518,625,078,981.00	1,518,625,078,981.00	1,507,149,074,087.00	1,548,998,662,087.00	1,552,000,914,087.00	1,552,000,914,087.00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	170,636,769,359.00	-
4.1.01	Pajak Daerah	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	71,052,979,848.00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	14,912,787,000.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	5,740,308,970.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	78,930,693,541.00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,336,512,304,728.00	1,336,512,304,728.00	1,336,512,304,728.00	1,347,988,309,622.00	1,347,988,309,622.00	1,347,988,309,622.00	1,379,693,892,728.00	1,378,361,892,728.00	1,381,364,144,728.00	1,381,364,144,728.00	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,188,021,942,028.00	1,188,021,942,028.00	1,188,021,942,028.00	1,199,497,946,922.00	1,199,497,946,922.00	1,199,497,946,922.00	1,231,203,530,028.00	1,231,203,530,028.00	1,234,205,782,028.00	1,234,205,782,028.00	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,005,482,709,028.00	1,005,482,709,028.00	1,005,482,709,028.00	1,016,958,713,922.00	1,016,958,713,922.00	1,016,958,713,922.00	1,048,664,297,028.00	1,048,664,297,028.00	1,046,367,629,028.00	1,046,367,629,028.00	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	138,149,692,000.00	138,149,692,000.00	138,149,692,000.00	149,625,696,894.00	149,625,696,894.00	149,625,696,894.00	181,331,280,000.00	181,331,280,000.00	181,331,280,000.00	181,331,280,000.00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	673,913,242,000.00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	27,007,100,028.00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	166,412,675,000.00	164,116,007,000.00	164,116,007,000.00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

4.2.01.02.01	DID	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	7,154,301,000.00	-
4.2.01.05	Dana Desa	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	180,683,852,000.00	180,683,852,000.00	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	175,384,932,000.00	180,683,852,000.00	180,683,852,000.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	148,490,362,700.00	147,158,362,700.00	147,158,362,700.00	147,158,362,700.00	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	140,478,612,700.00	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	6,679,750,000.00	6,679,750,000.00	6,679,750,000.00	-
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	8,011,750,000.00	6,679,750,000.00	6,679,750,000.00	-
5	JUMLAH PENDAPATAN	1,507,149,074,087.00	1,507,149,074,087.00	1,507,149,074,087.00	1,518,625,078,981.00	1,518,625,078,981.00	1,518,625,078,981.00	1,550,330,662,087.00	1,548,998,662,087.00	1,552,000,914,087.00	1,552,000,914,087.00	-
	BELANJA	1,771,270,300,216.00	1,771,270,300,216.00	1,771,270,300,216.00	1,782,746,305,110.00	1,782,746,305,110.00	1,782,746,305,110.00	1,725,057,251,995.93	1,814,451,888,216.00	1,814,451,888,216.00	1,816,122,140,216.00	1,670,252,000.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,184,212,548,670.00	1,184,212,548,670.00	1,184,460,020,188.00	1,207,954,860,212.00	1,207,957,921,866.00	1,165,322,234,513.00	1,165,322,234,513.00	1,252,890,352,893.45	1,252,890,352,893.45	1,246,696,019,440.52	6,194,333,452.93
5.1.01	Belanja Pegawai	593,164,082,191.00	593,164,082,191.00	593,194,012,191	614,037,193,117.00	614,039,273,117.00	610,300,346,039.00	692,891,672,299.02	692,484,604,874.40	690,441,047,219.20	687,437,913,860.88	3,003,133,358.32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522,453,782,543.00	522,453,782,543.00	522,669,374,161	524,700,158,936.00	524,701,140,590.00	488,512,777,315.00	495,201,872,275.05	493,782,421,860.05	492,700,024,786.85	492,634,779,420.64	65,245,366.21
5.1.05	Belanja Hibah	65,111,486,936.00	65,111,486,936.00	65,113,436,936	65,734,311,159.00	65,734,311,159.00	65,184,311,159.00	65,298,526,159.00	65,298,526,159.00	65,298,526,159.00	65,298,526,159.00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,483,197,000.00	3,483,197,000.00	3,483,196,900	3,483,197,000.00	3,483,197,000.00	1,324,800,000.00	1,324,800,000.00	1,324,800,000.00	1,324,800,000.00	1,324,800,000.00	-
5.2	BELANJA MODAL	293,804,082,911.00	293,804,082,911.00	293,556,611,393.00	301,463,297,313.00	301,460,235,659.00	286,588,438,446.60	286,468,688,982.60	285,860,048,881.00	285,860,048,881.00	277,877,583,574.20	7,982,465,306.80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108,925,198,913.00	108,925,198,913.00	109,006,771,085	109,080,205,048.00	108,622,313,394.00	102,287,085,916.00	102,167,336,452.00	102,024,946,020.00	99,873,019,397.20	92,690,031,715.20	7,182,987,682.00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37,235,575,913.00	37,235,575,913.00	37,023,457,223	39,201,224,184.00	39,256,054,184.00	37,981,984,449.60	37,981,984,449.60	37,515,734,780.00	39,254,768,476.00	39,134,803,778.00	119,964,698.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139,332,454,600.00	139,332,454,600.00	139,228,854,600	144,870,514,596.00	145,270,514,596.00	138,470,514,596.00	138,470,514,596.00	138,470,514,596.00	138,370,514,596.00	138,370,514,596.00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,045,753,485.00	8,045,753,485.00	8,032,428,485	8,046,253,485.00	8,046,253,485.00	7,583,753,485.00	7,583,753,485.00	7,583,753,485.00	7,621,633,485.00	7,432,133,485.00	189,500,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	265,100,000.00	250,100,000.00	250,100,000.00	-
5.3	BELANJA TERDUGA	20,115,248,550.00	20,115,248,550.00	20,115,248,550.00	179,480,684.00	179,480,684.00	57,826,465,249.40	257,161,599.33	2,692,319,540.55	2,692,319,540.55	13,240,450,300.28	10,548,130,759.73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20,115,248,550.00	20,115,248,550.00	20,115,248,550	179,480,684.00	179,480,684.00	57,826,465,249.40	257,161,599.33	2,692,319,540.55	2,679,619,195.75	13,240,450,300.28	10,560,831,104.53
5.4	BELANJA TRANSFER	273,138,420,085.00	273,138,420,085.00	273,138,420,085.00	273,148,666,901.00	273,148,666,901.00	273,009,166,901.00	273,009,166,901.00	273,009,166,901.00	273,009,166,901.00	13,240,450,300.28	259,768,716,600.72
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	8,596,576,685.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	264,541,843,400.00	264,541,843,400.00	264,541,843,400	264,552,090,216.00	264,552,090,216.00	264,412,590,216.00	264,412,590,216.00	264,412,590,216.00	269,711,510,216.00	269,711,510,216.00	-
	JUMLAH BELANJA	1,771,270,300,216.00	1,771,270,300,216.00	1,771,270,300,216.00	1,782,746,305,110.00	1,782,746,305,110.00	1,782,746,305,110.00	1,725,057,251,995.93	1,814,451,888,216.00	1,814,451,888,216.00	1,816,122,140,216.00	1,670,252,000.00
	TOTAL SURPLUS/(DEFISI T)											
6.	PEMBIAYAAN											
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	-
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya											-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan											-
	Pembiayaan Netto	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	264,121,226,129.00	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dari sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (out come) dan atau keluaran (output) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 didalam dokumen penetapan kinerja.

Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tercermin dari capaian 15 Sasaran Strategis RPJMD dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan



Singingi tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu :

1. Membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 1 (satu) tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan yang terdiri dari 15 sasaran dan 23 indikator mengacu pada indikator yang ada didalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melaporkan tingkat capaian kinerja yang merupakan pertanggungjawaban



kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, sasaran strategis, indikator kinerja dan target dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang dapat dicapai akhir tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2024 dan penetapan kinerja pada tahun 2024. Uraian target dan realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada formulir ikhtisar pencapaian kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Penilaian Kinerja

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	2	3	4
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 – 79,9	Baik	
3	50 – 59,9	Sedang	
4	0,1 – 49,9	Kurang	
5	0	Data Tidak Lengkap	

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian kinerja. Untuk mengukur capaian kinerja akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator kinerja.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tercermin dari capaian 15 Sasaran Strategis RPJMD dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara



efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Th. 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	Indeks ketertiban dan ketentraman umum (poin)	100.00	92.62	92.62
		Meningkatnya pengalaman nilai-nilai budaya daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (Persen)	96.00	96.54	100.56
2	2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini BPK RI (Predikat)	WTP	100	100
			Nilai AKIP (Poin)	66.20	64.64	97.64
			Skor LPPD (Skor)	3.00	2,34	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE (Poin)	3.00	3.23	107.67
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	87.00	87.00	100
3	3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.01	9.14	101.44
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13.42	13.38	99.70
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.16	69,44	100.40
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	96.90	90,56	93,45
4	4	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	PDRB ADHB (Rp juta)	50.029.80	51.995,69	103,93
			Gini Ratio	0,241	0,264	108,33



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	8,00	7,89	104,5
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,67	2,48	92,88
5	5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal (%)	6.00	5,4	85,66
		Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang di dukung dengan PSU (%)	100	100	100
		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	95.63	93.30	97.56
		Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	94.45	88.28	93.46
		Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik (%)	94.85	88.85	93.67
6	6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (Poin)	59.45	60.37	101.54
			Indeks kualitas udara (Poin)	94.65	87.02	91.94
			Indeks kualitas lahan (Poin)	55.09	49.68	90.18
Rata-rata Capaian Kinerja						97.18

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 15 sasaran dan 23 IKU disimpulkan 22 IKU capaiannya Sangat Baik, 1 IKU capaiannya Baik. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian



indikator tahun 2024 adalah sebesar **97,18%** dengan Skala nilai peringkat kinerja pada indikator ini **Sangat Baik**.

Selanjutnya untuk menganalisis pencapaian kinerja organisasi, maka capaian kinerja tahun 2024 dapat dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada target akhir RPJMD. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Th. 2024 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026.

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator	Target akhir RPJMD 2026	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Prediket Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	Indeks ketertiban dan ketentraman umum (poin)	90	100.00	92.62	102.9	Sangat Baik
		Meningkatnya pengalaman nilai-nilai budaya daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (Persen)	100	96.00	96.54	100.56	Sangat Baik
2	2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini BPK RI (Predikat)	WTP	WTP	100	100	Sangat Baik
			Nilai AKIP (Poin)	73.85	66.20	64.64	87.52	Sangat Baik
			Skor LPPD (Skor)	3	3	2,34	78	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE (Poin)	3.50	3	3.23	92.28	Sangat Baik
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84.50	87	87	102.95	Sangat Baik
3	3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.01	9.01	9.14	101.4	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

			Harapan lama sekolah (Tahun)	13.43	13.42	13.38	99.62	Sangat Baik
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.32	69.16	69.44	100.17	Sangat Baik
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	96.90	96.90	90.56	93.45	Sangat Baik
4	4	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	PDRB ADHB (Rp juta)	41.232,46	51.995,69	50.029,80	121.33	Sangat Baik
			Gini Ratio	0,268	0,241	0,26	97.01	Sangat Baik
		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	8	8	7.89	98.62	Sangat Baik
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.29	2,67	2,48	57.80	Sedang
5	5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal (%)	6	6	5,4	90	Sangat Baik
		Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU (%)	76.98	100	100	129.90	Sangat Baik
		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	76.98	95.63	93.30	121.2	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024

			(%)					
		Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	92.45	94.45	88.28	95.48	Sangat Baik
		Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik (%)	96.85	94.85	88.85	91.73	Sangat Baik
6	6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (Poin)	56.65	59.45	60.37	106.56	Sangat Baik
			Indeks kualitas udara (Poin)	91.18	94.65	87.02	95.43	Sangat Baik
			Indeks kualitas lahan (Poin)	56.47	55.09	49.68	87.97	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja							97.9	

Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 jika dibandingkan antara target akhir RPJMD dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, dimana skala nilai peringkat kinerja pada indikator sebesar 97.9% mencapai Prediket Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 meskipun terjadi perubahan tetapi tidak merubah target kinerja hanya merubah target anggaran menyesuaikan pergeseran yang terjadi selama tahun anggaran 2024.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut relatif sama dengan penjelasan capaian kinerja seperti yang dijelaskan sebelumnya karena pada tahun 2024 adalah tahun ketiga periode pelaksanaan RPJMD sehingga perbandingan capaiannya tidak terlalu signifikan selain perubahan target kinerjanya.



1

Sasaran ke-1
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang aman, nyaman
dan Agamais

Indikator 1 :
Indeks Ketertiban dan Ketentraman Umum

Capaian 2024
92.62 %

Target	Realisasi
100.00	92.62

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
94,5	1.88
Capaian 2023	Penurunan Capaian
94,5	1.88

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
90	102,91

Perbandingan dengan target Nasional

Tidak ada perbandingan

Gambar 3.1

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 1

Indeks ketertiban dan ketentraman umum merupakan indikator untuk mengukur peningkatan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamais. Hasil penyelesaian gangguan ketertiban dan ketentraman umum serta suasana kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Lingkungan sosial masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi relatif tentram, tertib, dan nyaman. Masyarakat melakukan berbagai aktivitas dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini ditandai dengan Capaian Indeks ketertiban dan ketentraman umum Tahun 2024 sudah **Sangat Baik** sebesar 92.62% dari target sebesar 100(poin) terealisasi sebesar 92,62(poin).

Pada aspek capaian Indeks ketertiban dan ketentraman umum mengalami penurunan 1.88% dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 94.5(poin) menurun pada tahun 2024 sebesar 92.62(poin). Sedangkan pada aspek capaian kinerja Indeks ketertiban dan ketentraman umum tahun 2023 ini juga mengalami penurunan 1,88% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94,5% menjadi 92,62% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahun Indeks ketertiban dan ketentraman umum melebihi target akhir RPJMD 92,62% dari target akhir RPJMD sebesar 90(poin) terealisasi sebesar 92,62(poin) pada tahun 2024.

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum lebih baik lagi di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penanganan pelanggaran Perda PEKAT Nomor : 14 tahun 2010 sebagaimana perubahan atas Perda Nomor: 20 tahun 2002, upaya yang dilakukan berupa :
 - Razia dan pengawasan;
 - Melakukan tindakan sanksi bagi yang melanggar sanksi administrasi (Membuat surat pernyataan dan penutupan tempat usaha).
2. Penanganan gangguan trantibum.
 - Patroli (membuat surat pernyataan, pembinaan fisik)
3. Melakukan pengaturan dan pengendalian massa.





2

Sasaran ke-2 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah

Indikator 2 : Persentase budaya daerah yang dilestarikan

Capaian 2024
100,56%

Target	Realisasi
96.00	96.54

Predikat Capaian Kinerja
Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
94.70	1.84
Capaian 2023	Penurunan Capaian
105.2	4.64

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
100	96.54

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tidak ada perbandingan

Gambar 3.2

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 2

Persentase budaya daerah yang dilestarikan pada tahun 2024 sudah **Sangat Baik** dengan capaian kinerja 96,54% dari target sebesar 96% dan terealisasi sebesar 100,56%.

Pada aspek persentase budaya daerah ini mengalami peningkatan sebesar 19,66% dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 94,70% menurun pada tahun 2024 sebesar 96,54%. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, persentase budaya daerah juga mengalami penurunan sebesar 4,644% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 105,2% menjadi 100,56% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, persentase budaya daerah hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 96.54% dari target akhir RPJMD sebesar 100% terealisasi sebesar 96,54% pada tahun 2024.

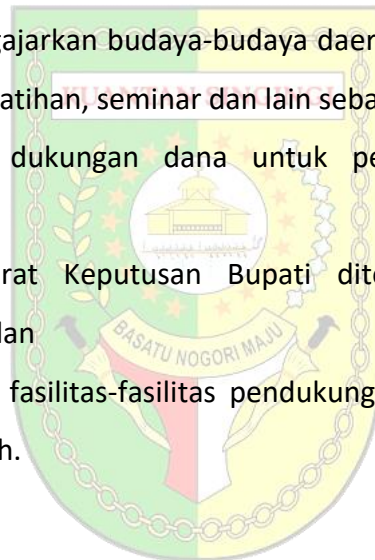
Tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melestarikan budaya yang saat ini dimiliki, guna meningkatkan kualitas hidup yang berbudaya dan membaur kepada kearifan lokal itu sendiri, sehingga



nantinya jangan sampai anak cucu kita tidak tahu akan budaya, tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Juga merupakan tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda Kabupaten Kuantan Singingi dalam melestarikan tradisi lokal adalah Globalisasi, era globalisasi memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mencari dan menerima informasi, berbagai informasi bisa didapat dengan mudah melalui internet dan media sosial dan tantangan utama dalam mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal adalah dampak negatif arus globalisasi yang berkembang dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melestarikan budaya daerah adalah :

1. Dengan mengajarkan budaya-budaya daerah kepada generasi muda seperti pelatihan -pelatihan, seminar dan lain sebagainya;
2. Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan event-event budaya daerah;
3. Dengan Surat Keputusan Bupati ditetapkan budaya-budaya yang dilestarikan; dan
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan event-event budaya daerah.





3

Sasaran ke-3 : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Sasaran meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dari 3 indikator yaitu **Opini BPK RI, Nilai AKIP dan Skor LPPD**.

1. Opini BPK RI

Indikator 3 : Opini BPK RI

Capaian 2024
100

Target Realisasi

WTP

100

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Tinggi

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
100	0
Capaian 2023	Penurunan Realisasi
100	0

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
WTP	100

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tidak Dapat Pengukuran Nasional

Gambar 3.3

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 3

Sasaran meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada indikator Opini BPK RI sudah **Sangat Baik**, hal ini ditandai dengan kembali meraih opini WTP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ke 13 kali nya berturut-turut pada tahun 2023. Namun demikian, pemberian predikat WTP oleh perwakilan BPK RI ini tidak berarti bahwa sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah. Tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti yang tertuang dalam rencana aksi (Opini BPK RI Tahun 2024 belum rilis, sehingga masih menggunakan data capaian Opini BPK RI Tahun 2023).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (Opini BPK RI) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.



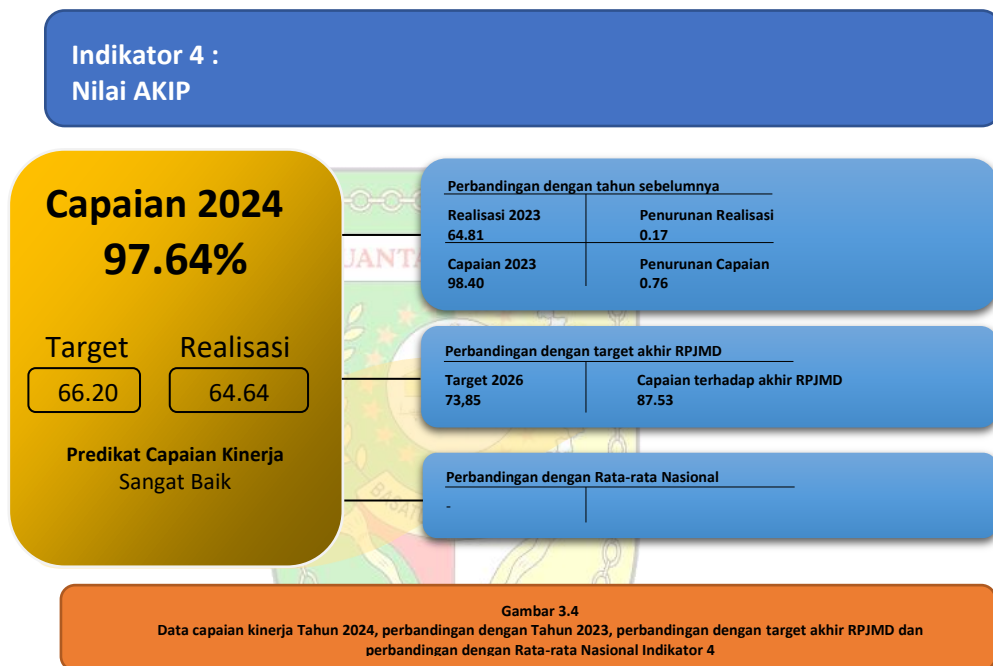
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali meraih opini WTP yang ke 13 kali berturut-turut pada Tahun Anggaran 2023. Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM menghadiri acara

serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau.



Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, khusus LKPD Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan meraih opini WTP, tidak terlepas dari sinergisitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. Segenap pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan pengawasan, budgeting dan regulasi dengan baik dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien

2. Nilai AKIP



Sasaran meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada indikator Nilai AKIP sudah **Sangat Baik**, hal ini ditandai dengan capaian Nilai AKIP tahun 2024 sebesar 97,64% yaitu dari target 66,20(poin) terealisasi 64,64(poin).

Realisasi Nilai AKIP tahun 2024 menurun sebesar 0,17(poin) yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 64,81(poin) menjadi 64,64(poin) pada tahun 2024. Dari segi capaian kinerja Nilai AKIP juga mengalami penurunan sebesar 0,76% dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,40% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 97,64%.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, posisi Nilai AKIP dengan target akhir RPJMD sudah mendekati batas aman yaitu target akhir RPJMD sebesar 73,85(poin) terealisasi sebesar 64,64(poin) sehingga capaiannya

sebesar 97,64%. indikator ini hanya digunakan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan level nasional.

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui akuntabilitas



kinerja pemerintah daerah dan OPD. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran dan kinerja yang selaras dan tepat dan SAKIP juga dapat memastikan rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

AKIP dilakukan melalui evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang terdiri dari berbagai prosedur, alat dan aktivitas yang digunakan untuk mengukur, mengumpulkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah.

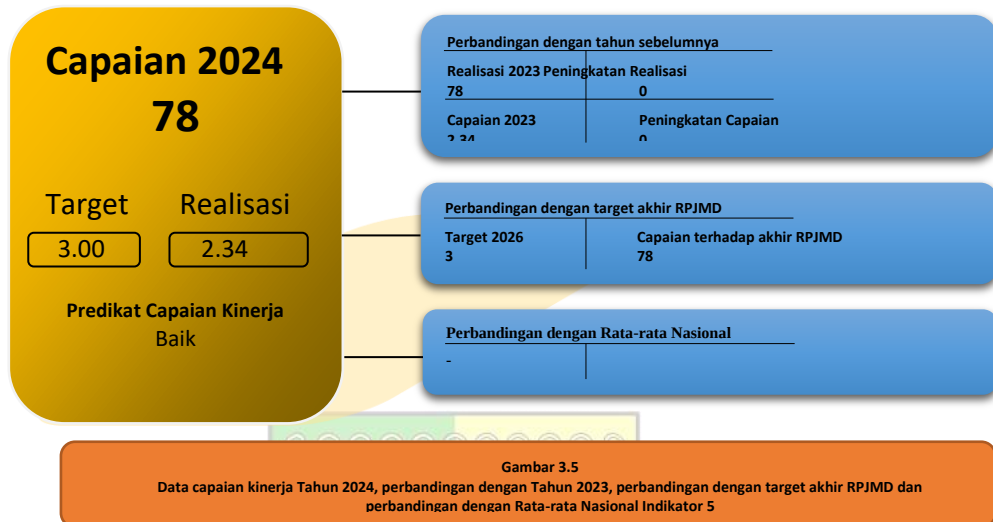
Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan. Evaluasi ini juga bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan implementasi SAKIP, hasil evaluasi SAKIP disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,64 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Faktor-faktor yang mendorong meningkatnya nilai AKIP yaitu dengan menindaklanjuti atas rekomendasi yang telah disampaikan pada hasil AKIP Tahun 2024.



3. Skor LPPD

Indikator 5 : Skor LPPD



Predikat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 **Baik**. Hal ini ditandai dengan capaian Nilai LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebesar 78% yaitu dari target 3 poin dan terealisasi sebesar 2.34 poin (Hasil LPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 belum rilis, sehingga masih menggunakan data capaian hasil LPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022).

Indikator ke-5 ini dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrument dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang berisikan ikhtisar penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran yang menggambarkan tentang berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dilakukan evaluasi oleh Tim Pemeriksa dan akan mengeluarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).



Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran pengambilan kebijakan dan pada tataran pelaksana kebijakan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintah, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengupayakan terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang telah dijadwalkan di Tahun 2024, dimana sebagian besar urusan pemerintah dan target pembangunan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang hasilnya belum maksimal.

Kita semua menyadari bahwa tidak ada pemerintahan yang mampu menyelesaikan semua masalah dalam waktu relatif singkat dan semua pihak, akan tetapi pada dasarnya pemerintahan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan kepada masyarakat dengan maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus menyatukan langkah dan membulatkan tekad untuk bekerja keras didalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)”.



4

**Sasaran ke-4 :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi**

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi diukur dari 2 indikator yaitu **Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat**.

1. Indeks SPBE

**Indikator 6 :
Indeks SPBE**

**Capaian 2024
107.67**

Target	Realisasi
3.00	3.23

**Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023 2.96	Peningkatan Realisasi 0.27
Capaian 2023 98.66	Peningkatan Capaian 9.01

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026 3,50	Capaian terhadap akhir RPJMD 92.28
---------------------	---------------------------------------

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Realisasi Nasional 2,85	Lebih Tinggi 0,38
----------------------------	----------------------

Gambar 3.6

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 6

Skala nilai peningkatan kinerja indeks SPBE pada tahun 2024 **Sangat Baik**, terbukti dengan Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi adalah 107,67% dari target sebesar 3(poin) dan terealisasi sebesar 3,23(poin).

Dari aspek realisasi, Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi meningkat 0,27(poin) dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,96(poin) dan pada tahun 2024 sebesar 3,23(poin). Sedangkan dari aspek capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 meningkat sebesar 9,01(poin) dari tahun 2024 sebesar 107,67% dan tahun 2023 sebesar 98,66%.



Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian indeks SPBE tahun 2024 sudah mendekati target akhir RPJMD sebesar 107,67% yaitu target akhir RPJMD sebesar 3,50 (poin) dan terealisasi sebesar 3,23 (poin).

Capaian Indeks SPBE tahun 2024 lebih tinggi dari capaian realisasi nasional sebesar 0,38 (poin) dari target Nasional sebesar 2,85 dan realisasi Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 3,23 (poin).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kab. Kuantan Singingi. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Kuantan Singingi sudah dapat



menggambarkan predikat BAIK dengan total nilai indeks adalah 3.234, dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik berbasis elektronik pemerintah dengan memiliki Indeks tertinggi yaitu 4.50. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dari pusat seperti JDIH, Lapor SP4N dan aplikasi yang mendukung RB Tematik yang telah memiliki integrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan OSS.

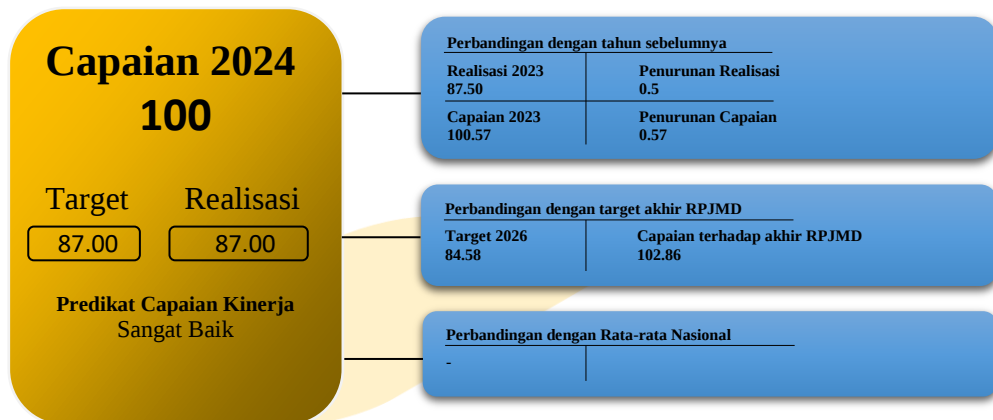
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijadikan indikator untuk mengetahui nilai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi atau merupakan acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur sipil Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang baik sesuai standar pelayanan, yakni mudah, efektif, cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata pada Tahun 2024 yaitu 87.



Indikator 7 :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



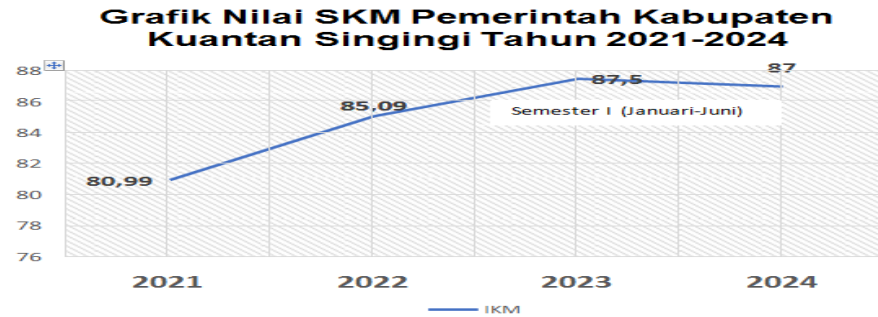
Gambar 3.7
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 7

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 sudah **Sangat Baik** dengan capaian kinerja IKM sebesar 100% dari target 87(poin) dan terealisasi sebesar 87(poin).

Pada aspek realisasi IKM ini mengalami penurunan 0,5(poin) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 87,50(poin) menurun pada tahun 2024 sebesar 87(poin). Sedangkan pada aspek capaian kinerja juga mengalami penurunan sebesar 0,57(poin) yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,57% menjadi 100% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, IKM melebihi target akhir RPJMD sebesar 102,86% dari target akhir RPJMD sebesar 84,58(poin) terealisasi 87(poin) pada tahun 2024. Capaian nasional tidak dapat dibandingkan karena hanya digunakan pada Kabupaten Kuantan Singingi.

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 3.8
Grafik Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik nilai SKM di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,5 dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2024 ini, UPP yang melakukan dan melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat meningkat pesat dari yang tahun sebelumnya hanya berjumlah 9 UPP, sedangkan pada tahun 2024 ini sebanyak 37 UPP.





5

Sasaran ke-5: Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Capaian meningkatnya kualitas pendidikan penduduk dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (mean years of schooling) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (expected years of schooling). Kedua indikator ini pula yang digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

1. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator 8 : Rata-rata Lama Sekolah

Capaian 2024
101.44

Target	Realisasi
9.01	9.14

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
8.90	0.24
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
100.34	1.1

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
9.01	101.44

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Realisasi Nasional	lebih Reandah
9.22	0.08

Gambar 3.9

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 8

Capaian Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 adalah sudah **Sangat Baik** dengan capaian sebesar 101,44% dari target sebesar 9,01(tahun) dan terealisasi sebesar 9,14(tahun).

Pada aspek realisasi RLS ini mengalami peningkatan 0,24(tahun) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 8,90(tahun) meningkat pada tahun 2024 sebesar 9,14(tahun). Sedangkan pada aspek capaian kinerja, RLS pada tahun 2024 mengalami peningkatan 1,1% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 100,34% meningkat pada tahun 2024 sebesar 101,44%.



Dari aspek perencanaan lima tahunan, rata-rata lama sekolah ini melebihi target akhir RPJMD sebesar 101,44% dari target akhir RPJMD sebesar 9,01(tahun) dan terealisasi sebesar 9,14(tahun) pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan nasional, RLS Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai target dari rata-rata nasional sebesar 0,08(tahun) dan baru terealisasi sebesar 9,14(tahun) pada tahun 2024.

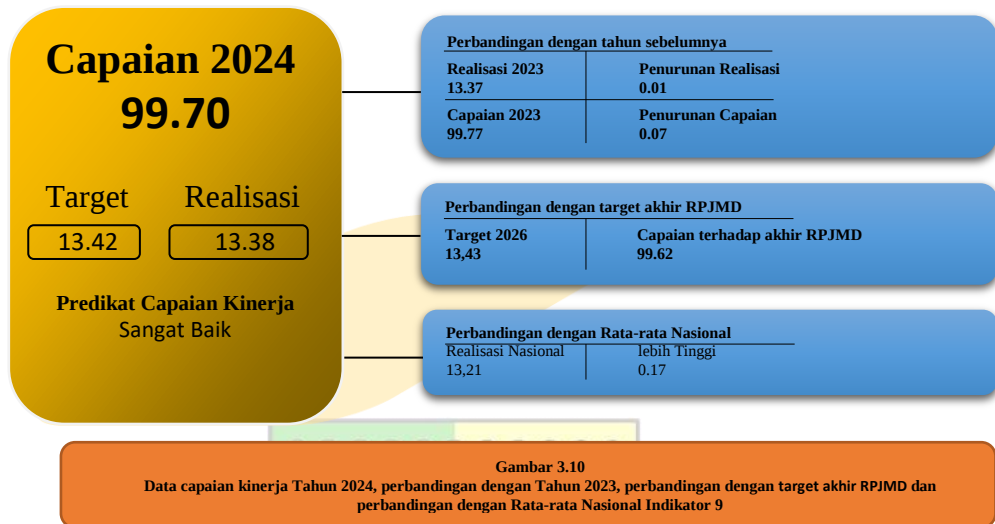
RLS merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator RLS sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Kuantan Singingi pada tahun 2024 telah mencapai 9,14 tahun, setara dengan sedang mengenyam bangku kelas 1 SMA. Sama halnya dengan HLS, RLS Kuantan Singingi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui, terutama pada kelompok pendidikan dasar. Upaya ini juga meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. RLS menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga RLS yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.



2. Harapan Lama Sekolah

Indikator 9 : Harapan Lama Sekolah



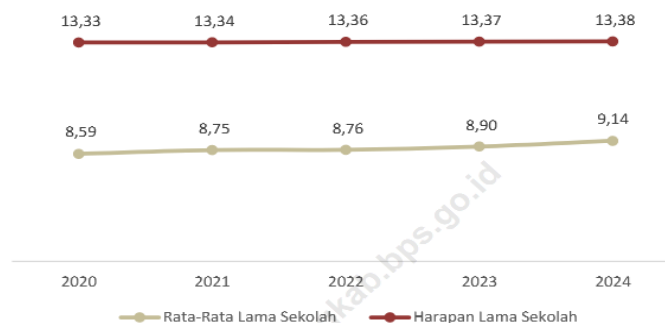
Aksesibilitas dan mutu pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi yang **Sangat Baik** juga bisa dilihat dari Harapan lama sekolah (HLS). Capaian kinerja HLS kabupaten Kuantan Singingi telah melebihi harapan pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,70% dengan target sebesar 13,42(tahun) dan terealisasi sebesar 13,38(tahun) pada tahun 2024.

Dari aspek realisasi, HLS mengalami penurunan sebesar 0,01(tahun) dari tahun 2022 sebesar 13,37(tahun) menurun pada tahun 2023 sebesar 13,38(tahun). Namun dari segi pencapaian kinerja mengalami penurunan 0,07% dari capaian tahun 2023 sebesar 99,77% sementara pada tahun 2024 sebesar 99,70%.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, HLS tahun 2024 hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 99,62% yaitu target akhir RPJMD sebesar 13,43(tahun) terealisasi sebesar 13,38(tahun). Pada tingkat nasional, realisasi HLS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 13,38 (tahun) lebih tinggi 0,17 (tahun) dari rata-rata nasional sebesar 13,21 (tahun).

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2024, HLS Kuantan Singingi telah mencapai 13,38 tahun, setara dengan

pendidikan D2. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus menunjukkan kenaikan. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat bahwa indikator pendidikan mengukur kualitas manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu objek yang kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan memberikan dampak yang berarti.



Gambar 3.11
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020-2024 (Tahun)
Sumber : Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Kabupaten Kuantan Singingi 2024

Angka harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam perhitungan HLS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), untuk siswa yang bersekolah di pesantren dihitung oleh Direktorat Pendidikan Islam.



6

**Sasaran ke-6 :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

**Indikator 10 :
Angka Harapan Hidup**

**Capaian 2024
100.40**

Target	Realisasi
69.16	69.44

**Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
69.13	0.31
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
100.18	0.22

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
69,32	100.17

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Realisasi Nasional	lebih Rendah
72,39	2,95

Gambar 3.12

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 10

Kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan. Capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2024 adalah **Sangat Baik** sebesar 100,40% dari target sebesar 69,16(tahun) terealisasi sebesar 69,44(tahun).

Pada aspek realisasi, rata-rata umur masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan. Realisasi AHH meningkat 0,31(tahun) dari tahun 2023 sebesar 69,12(tahun) menjadi 69,14(tahun) pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 0,22% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,18% menjadi 100,40% pada tahun 2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, AHH ini telah mencapai target karena masih pada tahun ke-3 RPJMD dengan capaian sebesar 100,17%, dimana target akhir RPJMD sebesar 69,32(tahun) sedangkan realisasi sebesar 69,44(tahun).adapun dilihat dari standar nasional, AHH Kabupaten Kuantan

Singingi ada di posisi 69,44(tahun) lebih rendah 2,95(tahun) dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional sebesar 72,39(tahun).

AHH merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dijadikan sebagai tolok ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan. AHH adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).

Peningkatan AHH Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah melalui program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Kendala/permasalahan dalam pencapaian angka harapan hidup sebagai berikut :

1. Belum meratanya aksesibilitas dan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah terpencil;
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara kesehatan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk peningkatan AHH di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama maupun di Rumah Sakit dan penyebarannya pada daerah-daerah terpencil;
2. Promosi kesehatan tentang menjalankan pola hidup sehat kepada masyarakat (Gerakan Masyarakat Sehat); dan
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).



AHH dijadikan indikator sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya. Apabila ditemukan AHH yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan AHH menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

7

Sasaran ke-7 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

Indikator 11 : Indeks Pembangunan Gender

Capaian 2024
93,45

Target	Realisasi
96,9	90,56

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Realisasi
90,56	0
Capaian 2023	Penurunan Capaian
93,47	0,02

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
96,90	107

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Belum Rilis

Gambar 3.13
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 11

Kualitas hidup Perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi **Sangat Baik**, dimana capaian Indikator indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 mencapai 93,45% dari target 96,9(poin) terealisasi sebesar 90,56(poin).



Dari aspek realisasi, IPG tetap dari tahun sebelumnya 90,56(poin) pada tahun 2023 dan juga sebesar 90,56(poin) pada tahun 2024. Sedangkan dari segi aspek capaian, IPG menurun 0,02% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 93,47% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 93,45%.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IPG tahun 2024 hampir mencapai target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 107 dari target RPJMD sebesar 96,90(poin) dan terealisasi sebesar 90,56(poin). Terkait dengan perbandingan nasional, karena indikator IPG secara nasional belum rilis, maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional. (Data IPG dipakai data tahun 2023 karena data tahun 2024 belum dirilis).

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah.

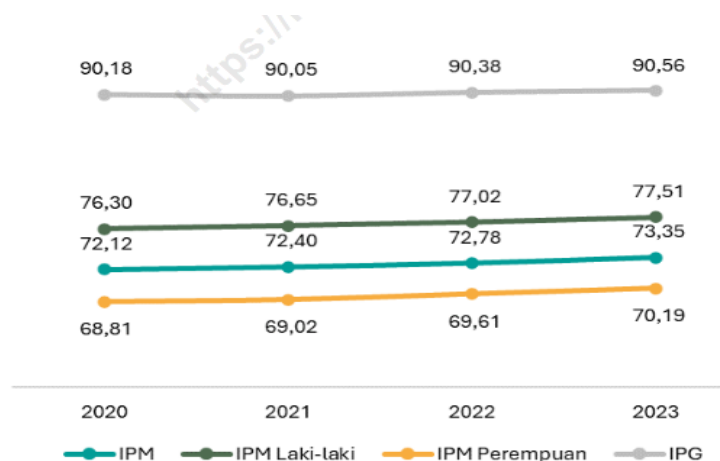
Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah umur harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta pengeluaran konsumsi (mewakili dimensi ekonomi).

Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan.

Banyak ahli mengemukakan pendapat tentang konsep pembangunan manusia. Namun Amartya Sen (1989) mengemukakan bahwa secara umum pembangunan manusia mengandung konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerja sama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan. Untuk

menyederhanakan konsep yang terlalu luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Namun IPM belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan Gender Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi). Selama tiga tahun terakhir IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi sama-sama mengalami peningkatan. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Pada tahun 2020-2023, IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan baru berhasil mencapai kategori tinggi pada tahun 2023. Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun.



Gambar 3.14
Perkembangan IPM, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2023 (Sumber: BPS Provinsi Riau)



Beberapa faktor diduga menjadi penyebab masih rendahnya capaian IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk analisis lebih jauh, perlu dilakukan perbandingan pencapaian pembangunan manusia di setiap dimensi, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

8

Sasaran ke-8 : Meningkatnya Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi

Capaian dari sasaran meningkatnya Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 dan bobot dijelaskan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu **PDRB ADHB** dan **Gini Ratio**. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

1. PDRB ADHB

Indikator 12 : PDRB ADHB

Capaian 2024
103,93

Target	Realisasi
50.029	51.995,69

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
47.650,57	4.345,12
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
97,15	6,78

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
41.232	126,1

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-

Gambar 3.15

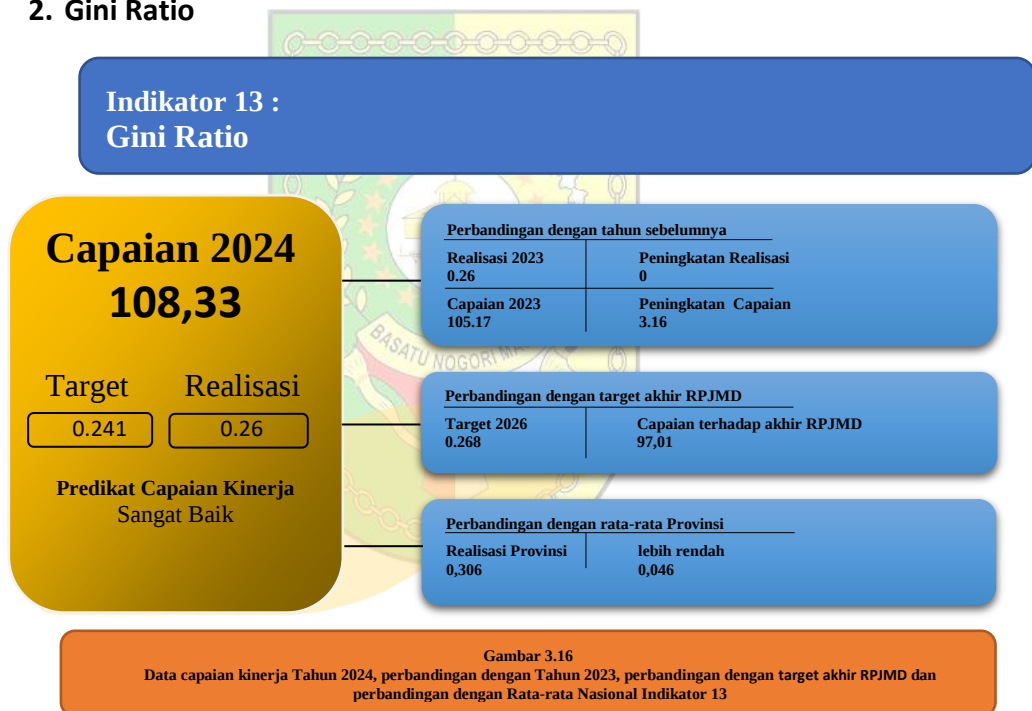
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 12



Capaian kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 **Sangat Baik**, mencapai 103,93% dari target 50.029(Rp juta) terealisasi sebesar 51.995,69(Rp. Juta).

Dari aspek realisasi, PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 4.345,12(Rp. Juta) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 47.650.57(Rp. Juta) menjadi 51.885,69 pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian kinerja, PDRB ADHB naik 6,78 (Rp. Juta) yaitu capaian tahun 2023 sebesar 97,15% dan capaian tahun 2024 sebesar 103,93%. PDRB ADHB tidak ada target nasional jadi tidak bias dibandingkan dengan rata-rata nasional.

2. Gini Ratio



Indeks gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini Ratio tahun 2024 sudah **Sangat Baik** dengan capaian kinerja 108,33% dari target sebesar 0,241 dan terealisasi sebesar 0,26.

Pada aspek realisasi Gini Ratio ini tetap tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 0,26 dan realisasi tahun 2024 sama 0,26. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, Gini Ratio mengalami



peningkatan sebesar 3,16% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 105,17% menjadi 108,33% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, Gini Ratio hampir sama dengan target akhir RPJMD sebesar 97,01% dari target akhir RPJMD sebesar 0,268 terealisasi sebesar 0,26. Capaian Gini Ratio masih lebih rendah 0,046 dari capaian Gini Ratio provinsi.

9

Sasaran ke-9: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran diukur dari 2 indikator yaitu **Persentase Penduduk Miskin** dan **Tingkat Pengangguran Terbuka** :

1. Persentase Penduduk Miskin

Indikator 14 : Persentase Penduduk Miskin

Capaian 2024
104.5

Target	Realisasi
8.00	7.89

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
8.07	0.18
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
100.5	4

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
8.00	98.62

Perbandingan dengan rata-rata provinsi Nasional

Realisasi Nasional	lebih tinggi
8,57%	0,68

Gambar 3.17

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 14

Kualitas dan taraf hidup masyarakat di Kabuapten Kuantan Singingi meningkat dengan predikat **Sangat Baik**, dimana Persentase penduduk miskin

hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 104,5% dari target sebesar 8% dan terealisasi 7,89% (BPS Maret 2024).

Dari aspek realisasi, persentase penduduk miskin menurun 0,18% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100,5% dan pada tahun 2024 sebesar 7,89%. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 4% dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,5% dan tahun 2024 sebesar 104,5%. Dalam kurun tiga tahun terakhir sejak maret 2022 sampai dengan maret 2024, dimana jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,54 ribu jiwa yaitu dari 26,10 ribu jiwa pada maret 2023 menjadi 25,56 ribu jiwa maret 2024.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 hampir mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 98,62% dari target akhir RPJMD sebesar 8% dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 7,89%.

Pada level nasional, capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi 0,68% disbanding rata-rata nasional dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,57% dan realisasi persentase penduduk miskin Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 7,89% pada tahun 2024.



Gambaran kesejahteraan masyarakat paling mudah memang dilihat dari tingkat kemiskinan. Namun, kemiskinan ini sendiri adalah suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, akan tetapi



kondisi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan seperti menjadi mata rantai yang dapat menjadi sebab dan sekaligus menjadi akibat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Tidak hanya pada level mikro, masalah kemiskinan ini juga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi secara makro.

Berpengaruhnya masalah kemiskinan terhadap pembangunan menjadikan masalah kemiskinan ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah nasional lainnya. Tidak heran jika kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara lain pun demikian. Dalam kesepakatan dunia internasional, pengentasan kemiskinan ini menjadi tujuan pertama dalam SDGs. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dunia internasional terhadap masalah kemiskinan.

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket-paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pengentasan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Kemiskinan ini seperti lingkaran yang membelenggu dimana kemiskinan ini bisa menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari rendahnya kualitas kehidupan manusia. Kompleksnya masalah kemiskinan ini, menjadikan masalah ini tidak mudah untuk dituntaskan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2024



Gambar 3.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020-2024
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2024

Pengentasan kemiskinan ini sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level nasional maupun daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, persentase kemiskinan di Kuantan Singingi cenderung mengalami penurunan. Tahun 2024, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 8,07 persen menjadi 7,89 persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator 15 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian 2024
92.88

Target Realisasi
2,67 2.48

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
2.49	0.01
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
86.45	6.43

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
4.29	57.8

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Realisasi Nasional	lebih Tinggi
7,38%	4,9

Gambar 3.19
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 15



Kualitas dan taraf hidup masyarakat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar 92,88% **Sangat Baik** dari target sebesar 2,67% terealisasi 2,48%.

Dari aspek realisasi, pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 lebih baik 0,01% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 2,49% menjadi 2,48% pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian kinerja, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 6,43% dari tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 86,45% menjadi 92,885 pada tahun 2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, TPT ini masih jauh dari target akhir RPJMD, karena TPT tahun 2024 masih berada pada tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026, dengan capaian sebesar 57,8% yaitu dari target TPT pada akhir RPJMD sebesar 4,29% dan terealisasi sebesar 2,48%. Adapun dalam konteks nasional, posisi TPT Kabupaten Kuantan Singingi masih buruk 4,9% dari rata-rata nasional dengan TPT Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 sebesar 2,48% dan TPT Nasional sebesar 7,38%.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kuantan Singingi pada Agustus 2024 mencapai 171.008 orang, bertambah sebanyak 6.339 orang dibanding Agustus 2023 (164.669). Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kuantan Singingi pada Agustus 2024 mencapai 166.768 orang, bertambah sebanyak 6.207 orang dibanding keadaan Agustus 2023 (160.561). Peningkatan angkatan kerja pada



periode yang sama diiringi dengan peningkatan TPAK. Selama periode 2023 dan 2024, Persentase TPAK di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 1,54 persen. Dari 63,95 persen pada Agustus 2023, menjadi 65,49 persen pada Agustus 2024.

Uraian	2023	2024
(1)	(2)	(3)
TPAK	63,95	65,49
TPT	2,49	2,48

Gambar 3.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dan 2024
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

10

Sasaran ke-10 : Meningkatnya pelayanan transportasi

Indikator 16 :
Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal

Capaian 2024
85,66

Target	Realisasi
6.00	5,14

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
5.17	0,03
Capaian 2023	Penurunan Capaian
86.16	0,5

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
6	85,66

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-	-
---	---

Gambar 3.21
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 16

Capaian kinerja Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal tahun 2024 sebesar 85,66% sudah **Sangat Baik** yaitu dari target sebesar 6% dan realisasi sebesar 5,14%.

Dari segi realisasi, Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar



0,03% yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 5,17% menjadi 5,14% pada tahun 2024. Namun dari segi pencapaian kinerja, Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,5% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 86,16% dan pada tahun 2024 sebesar 85,66%.

Pada sisi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal Kabupaten Kuantan Singingi sama dengan target akhir RPJMD sebesar 85,66% yaitu dari target akhir RPJMD sebesar 6% realisasi 5,14%, karena indikator ini hanya digunakan pada Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

11

Sasaran ke-11: Meningkatnya Infrastruktur permukiman

Indikator 17 :
Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU

Capaian 2024
100

Target	Realisasi
100	100

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
100	0
Capaian 2023	Penurunan Capaian
107.79	7.79

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
76.98	129.90

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-	-
---	---

Gambar 3.22
Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 17

Pembangunan infrastruktur permukiman merupakan amanat yang di emban bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang



Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Capaian Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 **Sangat Baik** sebesar 100% dari target 100% terealisasi 100%.

Dari aspek realisasi, Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 ini cenderung menunjukkan pola yang sama dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan 7,79% dari tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 107.79% menjadi 100% pada tahun 2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU Kabupaten Kuantan Singingi ini melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 129,90% yaitu dari target pada akhir RPJMD sebesar 76,98% dan terealisasi sebesar 100%. Adapun dalam konteks nasional, tidak dapat dibandingkan karena Indikator Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU ini hanya digunakan di Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.



12

Sasaran ke-12 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum

Indikator 18 :

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Capaian 2024
97.56

Target	Realisasi
95.63	93.30

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
93.80	0.5
Capaian 2023	Penurunan Capaian
532.04	434.48

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
76.98	121.2

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-

Gambar 3.23

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 18

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada tahun 2024 sudah **Sangat Baik** dengan Capaian kinerja adalah sebesar 97,56% dari target sebesar 95,63% terealisasi sebesar 93,30%.

Realisasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 93,80% meningkat pada tahun 2024 sebesar 97,56%. Sedangkan pada aspek capaian kinerja tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 434,48% yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 532,04% menjadi 97,56% pada tahun 2024.



Dari aspek perencanaan lima tahunan, Realisasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Kabupaten Kuantan Singingi melebihi target akhir RPJMD sebesar 121,2% dari target akhir RPJMD sebesar 76,98% terealisasi sebesar 93,30%. Realisasi yang jauh melampaui target RPJMD pada tahun 2023, terjadi karena adanya perubahan nomenklatur dan regulasi kewenangan, sehingga pembangunan jaringan perpipaan kawasan pedesaan dan perkotaan berada pada dinas PUPR, dimana yang sebelumnya hanya jaringan perpipaan dikawasan perkotaan saja. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak ini hanya digunakan di Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

13

Sasaran ke-13:

Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Indikator 19 :

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Capaian 2024
93.46

Target Realisasi

94.45

88.28

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
93.00	0.46
Capaian 2023	Penurunan Capaian
107.57	14.11

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
92.45	95.48

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-

Gambar 3.24

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 19



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sudah **Sangat Baik**, dengan capaian sebesar 93,46% dari target sebesar 94,45 terealisasi sebesar 88,28.

Dari segi realisasi, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurun sebesar 0,46 yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 93,00 menjadi 88,28 pada tahun 2024. Namun dari segi aspek pencapaian kinerja, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mengalami penurunan sebesar 14,11% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 107,57% dan pada tahun 2024 sebesar 93,46%.

Pada sisi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 95,48% belum mencapai target yaitu target akhir RPJMD sebesar 92,46 terealisasi sebesar 88,28 karena pada tahun 2024 masih tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak ini hanya digunakan di Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.



14

Sasaran ke-14 :
Meningkatnya Infrastruktur dan konservasi sumber
daya air

Indikator 20 :
Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik

Capaian 2024
93.67

Target	Realisasi
94.85	88.85

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
84.85	4
Capaian 2023	Peningkatan Capaian
90.41	3.26

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
96.85	91.73

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

-

Gambar 3.25

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 20

Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 **Sangat Baik**, dengan capaian kinerja sebesar 93,67% yaitu dari target sebesar 94,85% dan terealisasi sebesar 88,85%.

Dari segi realisasi, Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik Kabupaten Kuantan Singingi meningkat 4% yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 84,85% menjadi 88,85% pada tahun 2024. Namun dari segi pencapaian kinerja, Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik ini mengalami peningkatan sebesar 3,26% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 90,41% dan pada tahun 2024 sebesar 93,67%.

Pada sisi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 91,73% yaitu target akhir RPJMD sebesar 96,85% realisasi sebesar 88,85%. Terkait dengan perbandingan



nasional, karena Indikator Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik ini hanya digunakan di Kabupaten Kuantan Singingi maka tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

15

Sasaran ke-15 : Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

Capaian dari sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 dan bobot dijelaskan dengan 3 (tiga) indikator kinerja Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan. Target dan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

1. Indeks kualitas Air

Indikator 21 : Indeks kualitas Air

Capaian 2024
101.54

Target	Realisasi
59.45	60.37

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
53.81	6.56
Capaian 2023	Peningkatan Realisasi
90.51	11.03

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
56.65	106.56

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tingkat Nasional berada pada peringkat 76 dari 514 Kabupaten/Kota

Perbandingan dengan Tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi berada pada peringkat 1 dari 12 Kabupaten/Kota

Gambar 3.26

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 21

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar 101,54% sudah **Sangat Baik** dari target sebesar 59,45(poin) dan terealisasi sebesar 60,37(poin).

Dari segi realisasi, IKA meningkat 6,56(poin) yaitu tahun 2023 sebesar 53,81(poin) dan tahun 2024 menjadi 60,37(poin). Sedangkan dari segi capaian



kinerja, IKA mengalami peningkatan sebesar 11,03% yaitu pada tahun 2023 sebesar 90,51% dan pada tahun 2024 sebesar 101,54%.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian IKA Kabupaten Kuantan Singingi melampaui target akhir RPJMD sebesar 106,56% yaitu target RPJMD sebesar 56,65(poin) dan realisasi sebesar 60,37(poin). Pada tingkat nasional IKA Kabupaten Kuantan Singingi berada pada peringkat 76 dari 514 Kabupaten/Kota sedangkan pada tingkat provinsi berada pada peringkat 1 dari 12 Kabupaten/Kota.

Indeks kualitas air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan, indeks Kualitas Air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Minimal ada 8 Parameter yang digunakan untuk indeks kualitas air, yaitu : pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat dan Fecal Coliform. Data untuk Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dengan melakukan pengujian sampel air pada beberapa titik mewakili 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan parameter pengujian sebanyak 8 parameter, antara lain : pH, BOD, COD, DO, TSS, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform

Untuk mempertahankan serta meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan serta pengelolaan mutu air antara lain patroli sungai,
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pusat, provinsi dan daerah dalam hal pengelolaan mutu air,
- c. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan berlaku serta,
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL domestic



2. Indeks Kualitas Udara

Indikator 22 :
Indeks kualitas Udara

Capaian 2024
91.94

Target	Realisasi
94.65	87.02

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Penurunan Realisasi
93.46	1.52
Capaian 2023	Penurunan Capaian
99.44	7.5

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
91.18	95.43

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tingkat Nasional berada pada peringkat 338 dari 514 Kabupaten/Kota

Perbandingan dengan Tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi berada pada peringkat 10 dari 12 Kabupaten/Kota

Gambar 3.27

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 22

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sudah **Sangat Baik** sebesar 91,94% dari target sebesar 94.65(poin) dan terealisasi sebesar 87.02(poin).

Pada aspek realisasi IKU ini mengalami penurunan realisasi sebesar 1,52(poin) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 93,46(poin) menurun menjadi 87,02(poin) pada tahun 2024. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, IKU pada tahun 2024 mengalami penurunan 7,5% yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,44% menjadi 91,94% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, IKU belum mencapai target akhir RPJMD 95,43% dari target akhir RPJMD sebesar 91,18(poin) terealisasi sebesar 87,02(poin). Pada Tingkat nasional IKU Kabupaten Kuantan Singingi berada pada peringkat 338 dari 514 Kabupaten/Kota, dan untuk tingkat provinsi berada pada peringkat 10 dari 12 Kabupaten Kota.

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara, indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Indeks Kualitas



Udara (IKU) dilakukan dengan melakukan pengujian sampel udara menggunakan peralatan *Passive Sampler* yang dipasang pada 4 (empat) titik, yaitu : Transportasi, Perkantoran, Pemukiman dan Industri. Pengambilan sampel udara dilakukan pada 2 tahap mewakili musim hujan dan musim kemarau dengan parameter pengujian NOx dan SOx. Untuk mempertahankan serta meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan cara sebagai berikut :

- Membuat Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.
- Menyiapkan anggaran khususnya untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara.
- Melakukan pemantauan udara dengan menggunakan sarana dan prasarana dari APBD, sehingga data tidak terbatas dengan cara menambah lokasi titik pantau.

3. Indeks Kualitas Lahan

Indikator 23 :
Indeks kualitas Lahan

Capaian 2024
90.18

Target	Realisasi
55.09	49.68

Predikat Capaian Kinerja
Sangat Baik

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2023	Peningkatan Realisasi
49.22	0.46
Capaian 2023	Penurunan Capaian
91.60	1.42

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target 2026	Capaian terhadap akhir RPJMD
56.47	87.97

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tingkat Nasional berada pada peringkat 243 dari 514 Kabupaten/Kota

Perbandingan dengan Tingkat Provinsi

Tingkat provinsi berada pada peringkat 7 dari 12 Kabupaten/Kota

Gambar 3.28

Data capaian kinerja Tahun 2024, perbandingan dengan Tahun 2023, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan Rata-rata Nasional Indikator 23

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sudah **Sangat Baik** sebesar 90,18% dari target sebesar 55.09(poin) dan terealisasi sebesar 49,68(poin).

Pada aspek realisasi IKL Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,46(poin) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 48,22(poin) meningkat pada tahun 2024 sebesar 49,68(poin). Sedangkan pada aspek capaian kinerja, IKL pada tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 1,42% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 91,60% menjadi 90,18% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, IKL Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 87,97% dari target akhir RPJMD sebesar 56,47(poin) terealisasi sebesar 49,68(poin) pada tahun 2024. Untuk perbandingan dengan rata-rata nasional berada pada peringkat 243 dari 514 Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi berada pada peringkat 7 dari 12 Kabupaten/Kota.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada indikator ke-23 adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan memasukkan beberapa data yang diinput kedalam rumus. Data-data tersebut terdiri dari : Luas wilayah (LW), Luas Tutupan Hutan (LTH), Luas Tutupan Belukar (LTB), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk mempertahankan serta meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lahan (IKL), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mempertahankan tutupan lahan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan dan pencegahan kerusakan lahan serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk ke depannya Kabupaten Kuantan Singingi berupaya meningkatkan penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan penambahan RTH bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

3.2. Realisasi Anggaran

APBD merupakan Dokumen Formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah.



Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama Tahun 2024 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.552.000.914.087,00. Pada akhir Tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar 1.419.767.593.026,38 atau sebesar 91,48 %.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Rincian capaian pendapatan sebagai berikut :

1. PAD dapat direalisasikan sebesar Rp 122.184.404.669,38 atau 71,60% dari target Rp 170.636.769.369,00 atau menurun dibandingkan dengan PAD tahun 2023 sebesar Rp 204.404.801.087,13. Jika dilihat dari masing-masing komponen PAD seluruh komponen PAD menurun yakni penerimaan pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp 1.297.581.177.757,00, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.338.969.731.589,00. Sedangkan Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2024 dari pendapatan lainnya sebesar Rp 2.010.600,00 naik dari tahun 2023 sebesar Rp 565.276.288,00.

3.2.2 Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar Rp 1.419.767.593.026,38 (91,48%), terdiri dari :

1. PAD sebesar Rp 122.184.404.669,38
2. Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp 1.297.581.177.757,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 2.010.600,00

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.816.122.140.216,00, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.582.481.329.816,47 atau capaian sebesar 87,14%. Rincian Realisasi



Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terlampir.

3.3. Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran

3.3.1 Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun Anggaran	Opini BPK	Ket
1	Tahun 2011	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian	
3	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian	
4	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian	
5	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian	
6	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian	
7	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian	
8	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian	
9	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian	
10	Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian	
12	Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian	
12	Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian	
13	Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian	



APBD merupakan Dokumen Formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah.

Pada Tahun 2024 total anggaran belanja Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 1.816.122.140.216,00, total realisasi belanja Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 1.582.481.329.816,47 dengan capaian realisasi sebesar 87,14%. Total PAD yang direalisasikan sebesar Rp. 122.184.404.669,38. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.297.581.177.757,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 2.010.600,00. Lebih rincinya akan disajikan pada ***lampiran*** LKIP ini.





BAB IV

PENUTUP

LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 telah berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap IKU sasaran pada masing-masing sasaran berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian indikator tahun 2024 adalah sebesar **97,18%** dengan Skala nilai peringkat kinerja pada indikator ini **Sangat Baik**.

Sebagian besar sasaran strategis RPJMD sudah mencapai target. Dari 23 IKU, sebanyak 22 IKU capaiannya Sangat Baik berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi dan terdapat 1 target IKU yang tidak tercapai yaitu : Skor LPPD disebabkan kurang cermatnya perangkat daerah pengampu dalam menyampaikan data yang diinginkan (tidak sesuai format, judul berbeda dengan datayang disajikan, tidak ada data sama sekali).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meningkat secara berkelanjutan.



Teluk Kuantan, 25 Maret 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM**

Jabatan : **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Teluk Kuantan, April 2024

Bupati Kuantan Singingi,



Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BUPATI KUANTAN SINGINGI**

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024
1	1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	Indeks ketertiban dan ketentraman umum (poin)	100.00
		Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (Persen)	96.00
2	2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini BPK RI (Predikat)	WTP
			Nilai AKIP (Poin)	66.2
			Skor LPPD (Skor)	3.00
			Indeks SPBE (Poin)	3.00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	87.00
3	3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.01
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13.42
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.16
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	96.9
4	4	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	PDRB ADHB (Rp juta)	50,029.80
			Gini Ratio	0,215-0,241
		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	7,55-8,00
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,15-2,67
5	5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal (%)	6.00
		Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU (%)	100
		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	95.63
		Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	94.45
		Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik (%)	94.85
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (Poin)	59.45
			Indeks kualitas udara (Poin)	94.65
			Indeks kualitas lahan (Poin)	55.09



April 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Dr. H. SUBARDIMAN AMBY, MM



Kabupaten Kuantan Singingi

Provinsi Riau

2024



IKA
60.37

SEDANG

Indeks Respon IKA

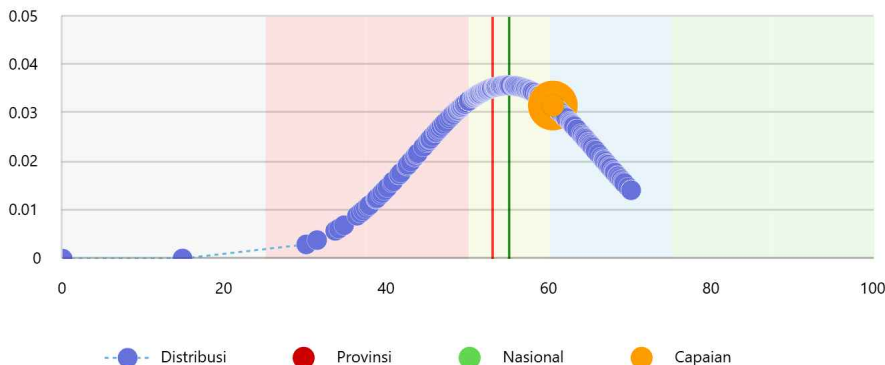
44.00

Peringkat

Nasional : 76 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 12 Kabupaten/Kota

Posisi IKA



Tren IKA



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	1	3	3
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	12	24	24
TOTAL	13	27	27

Indeks Respon Air



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

"1. Menyusun Peraturan Terkait Pengendalian pencemaran air, pengelolaan sampah 2. Meningkatkan anggaran pengendalian pencemaran air 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta usaha skala kecil 4. Meningkatkan jumlah titik pantau 5. Meningkatkan jumlah IPAL Domestik 6. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan 7. Meningkatkan upaya publikasi 8. Meningkatkan upaya inovasi"



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Kuantan
Singingi
Provinsi Riau
2024



IKU
87.02

BAIK

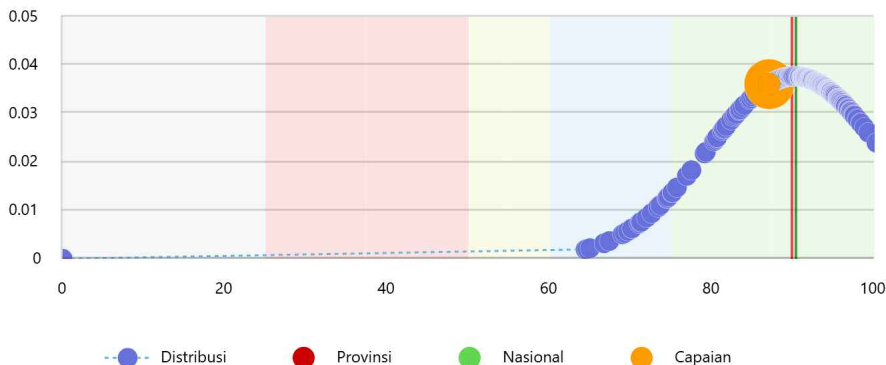
Indeks Respon IKU
17.86

Peringkat

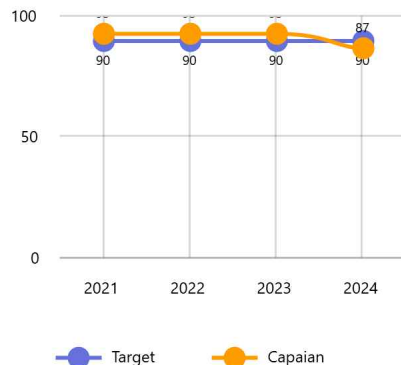
Nasional : 338 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 10 dari 12 Kabupaten/Kota

Posisi IKU



Tren IKU



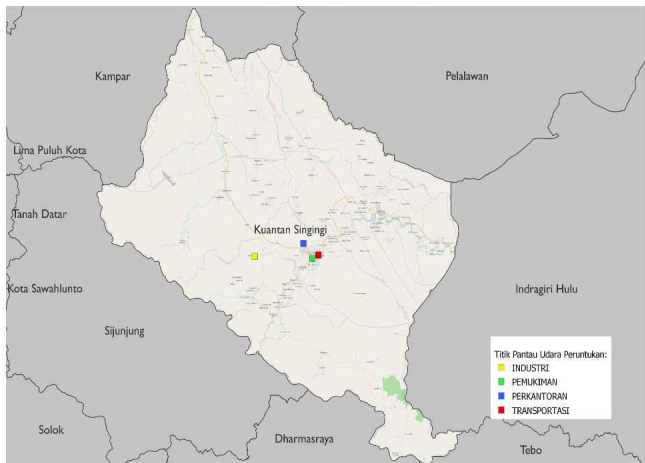
Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	4	8	8

Indeks Respon Udara



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

Capaian IKU tahun 2024 sebesar 87,02 belum memenuhi target yang ditetapkan, yakni 90,98. Diperlukan langkah sebagai berikut untuk dapat meningkatkan nilai IKU& IRLH :

- Menyusun kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara dan menetapkan target IKU kedalam RPJMD.
- Menambah dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengendalian pencemaran udara
- Menyiapkan anggaran APBD khusus untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara.
- Melakukan pemantauan kualitas udara dengan penggunaan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar
- Meningkatkan peran serta Masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara.
- Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media

Kabupaten Kuantan
Singingi

Provinsi Riau

2024

IKL
49.68

KURANG

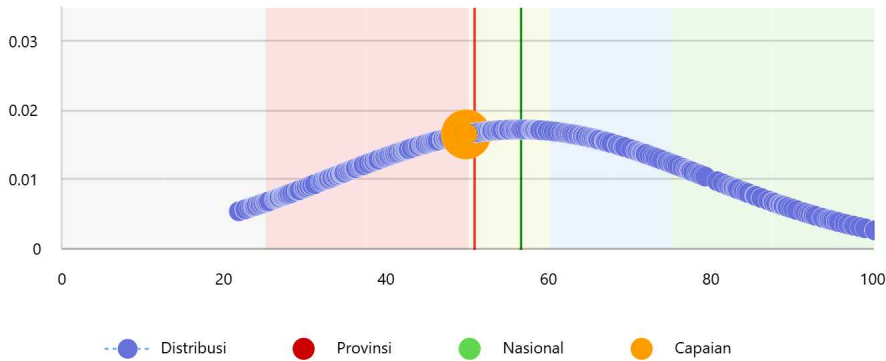
Indeks Respon IKL
27.50

Peringkat

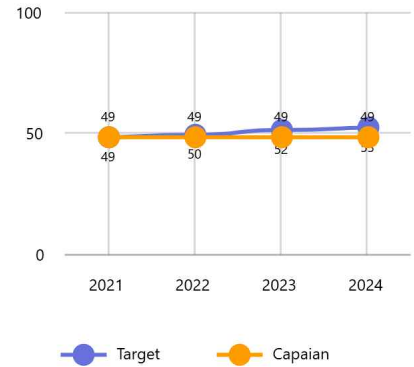
Nasional : 243 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 7 dari 12 Kabupaten/Kota

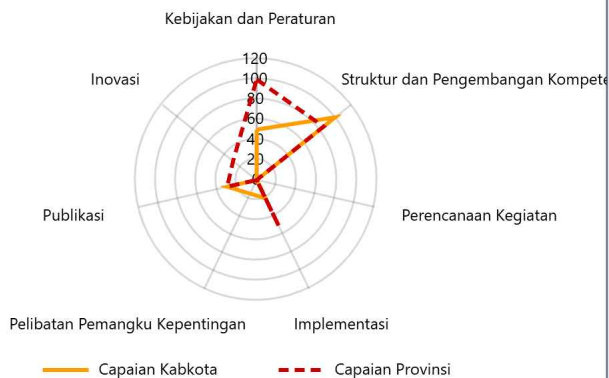
Posisi IKL



Tren IKL



Indeks Respon Tutupan Lahan



Kualitas Tutupan Lahan

Rekomendasi

Perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan

Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Perlu membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.552.000.914.087,00	1.419.767.593.026,38	91,48	132.233.321.060,62
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.636.769.359,00	122.184.404.669,38	71,60	48.452.364.689,62
1.1.01.	Pajak Daerah	71.052.979.848,00	37.011.522.087,09	52,09	34.041.457.760,91
1.1.01.09.	Pajak Reklame	700.000.000,00	203.975.161,00	29,14	496.024.839,00
1.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	700.000.000,00	203.975.161,00	29,14	496.024.839,00
1.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	700.000.000,00	203.975.161,00	29,14	496.024.839,00
1.1.01.12.	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	120.553.427,00	30,14	279.446.573,00
1.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	120.553.427,00	30,14	279.446.573,00
1.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	120.553.427,00	30,14	279.446.573,00
1.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.520.000.000,00	158.686.005,00	10,44	1.361.313.995,00
1.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.520.000.000,00	158.686.005,00	10,44	1.361.313.995,00
1.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.520.000.000,00	158.686.005,00	10,44	1.361.313.995,00
1.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.192.979.848,00	5.751.904.128,00	51,39	5.441.075.720,00
1.1.01.15.01.	PBBP2	11.192.979.848,00	5.751.904.128,00	51,39	5.441.075.720,00
1.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.192.979.848,00	5.751.904.128,00	51,39	5.441.075.720,00
1.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00	5.255.746.334,00	35,04	9.744.253.666,00
1.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00	5.255.746.334,00	35,04	9.744.253.666,00
1.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00	5.255.746.334,00	35,04	9.744.253.666,00
1.1.01.19.	PBJT	42.140.000.000,00	25.520.657.032,09	60,56	16.619.342.967,91
1.1.01.19.01.	PBJT-Restoran	2.925.000.000,00	2.685.407.135,09	91,81	239.592.864,91
1.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.925.000.000,00	2.685.407.135,09	91,81	239.592.864,91
1.1.01.19.02.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik	38.080.000.000,00	22.473.386.043,00	59,02	15.606.613.957,00
1.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	37.000.000.000,00	21.223.737.819,00	57,36	15.776.262.181,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.080.000.000,00	1.249.648.224,00	115,71	(169.648.224,00)
1.1.01.19.03.	PBJT-Hotel	415.000.000,00	142.385.050,00	34,31	272.614.950,00
1.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	415.000.000,00	142.385.050,00	34,31	272.614.950,00
1.1.01.19.04.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	460.000.000,00	194.728.804,00	42,33	265.271.196,00
1.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	460.000.000,00	194.728.804,00	42,33	265.271.196,00
1.1.01.19.05.	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	260.000.000,00	24.750.000,00	9,52	235.250.000,00
1.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	260.000.000,00	24.750.000,00	9,52	235.250.000,00
1.1.02.	Retribusi Daerah	14.912.787.000,00	4.808.077.831,00	32,24	10.104.709.169,00
1.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	2.195.563.000,00	948.441.000,00	43,20	1.247.122.000,00
1.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
1.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
1.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	581.693.000,00	465.321.000,00	79,99	116.372.000,00
1.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	581.693.000,00	465.321.000,00	79,99	116.372.000,00
1.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	820.000.000,00	110.713.000,00	13,50	709.287.000,00
1.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	820.000.000,00	110.713.000,00	13,50	709.287.000,00
1.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	543.870.000,00	372.407.000,00	68,47	171.463.000,00
1.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	543.870.000,00	372.407.000,00	68,47	171.463.000,00
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.717.224.000,00	1.986.196.779,00	20,44	7.731.027.221,00
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	580.000.000,00	253.758.955,00	43,75	326.241.045,00
1.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	580.000.000,00	253.758.955,00	43,75	326.241.045,00
1.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	550.000.000,00	149.625.000,00	27,20	400.375.000,00
1.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	550.000.000,00	149.625.000,00	27,20	400.375.000,00
1.1.02.02.12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	706.724.000,00	268.538.000,00	38,00	438.186.000,00
1.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	706.724.000,00	268.538.000,00	38,00	438.186.000,00
1.1.02.02.14.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	110.000.000,00	42.450.000,00	38,59	67.550.000,00
1.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	110.000.000,00	42.450.000,00	38,59	67.550.000,00
1.1.02.02.15.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	60.500.000,00	23.700.000,00	39,17	36.800.000,00
1.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	60.500.000,00	23.700.000,00	39,17	36.800.000,00
1.1.02.02.17.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	260.000.000,00	59.463.000,00	22,87	200.537.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	260.000.000,00	59.463.000,00	22,87	200.537.000,00
1.1.02.02.19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.155.000.000,00	741.406.600,00	34,40	1.413.593.400,00
1.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.155.000.000,00	741.406.600,00	34,40	1.413.593.400,00
1.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.295.000.000,00	447.255.224,00	8,45	4.847.744.776,00
1.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.295.000.000,00	447.255.224,00	8,45	4.847.744.776,00
1.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000.000,00	1.873.440.052,00	62,45	1.126.559.948,00
1.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	1.873.440.052,00	62,45	1.126.559.948,00
1.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	1.873.440.052,00	62,45	1.126.559.948,00
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.740.308.970,00	4.414.250.343,00	76,90	1.326.058.627,00
1.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.740.308.970,00	4.414.250.343,00	76,90	1.326.058.627,00
1.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.740.308.970,00	4.414.250.343,00	76,90	1.326.058.627,00
1.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.740.308.970,00	4.414.250.343,00	76,90	1.326.058.627,00
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	78.930.693.541,00	75.950.554.408,29	96,22	2.980.139.132,71
1.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.000.000.000,00	252.078.100,00	8,40	2.747.921.900,00
1.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.000.000.000,00	252.078.100,00	8,40	2.747.921.900,00
1.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.000.000.000,00	252.078.100,00	8,40	2.747.921.900,00
1.1.04.05.	Jasa Giro	12.000.000.000,00	2.130.362.355,00	17,75	9.869.637.645,00
1.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	2.130.362.355,00	17,75	9.869.637.645,00
1.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	2.130.362.355,00	17,75	9.869.637.645,00
1.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.573.357.484,09	157,34	(573.357.484,09)
1.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	183.553.906,00	-	(183.553.906,00)
1.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	183.553.906,00	-	(183.553.906,00)
1.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	1.389.803.578,09	138,98	(389.803.578,09)
1.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	1.389.803.578,09	138,98	(389.803.578,09)
1.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	509.222.894,67	16,97	2.490.777.105,33
1.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	509.222.894,67	16,97	2.490.777.105,33

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	509.222.894,67	16,97	2.490.777.105,33
1.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	8.186.345,00	-	(8.186.345,00)
1.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	587.880,00	-	(587.880,00)
1.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	587.880,00	-	(587.880,00)
1.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	3.011.005,00	-	(3.011.005,00)
1.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	3.011.005,00	-	(3.011.005,00)
1.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	90.000,00	-	(90.000,00)
1.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	90.000,00	-	(90.000,00)
1.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	630.000,00	-	(630.000,00)
1.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	630.000,00	-	(630.000,00)
1.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	857.208,00	-	(857.208,00)
1.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	857.208,00	-	(857.208,00)
1.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.193.052,00	-	(1.193.052,00)
1.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.193.052,00	-	(1.193.052,00)
1.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	27.646,00	-	(27.646,00)
1.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	27.646,00	-	(27.646,00)
1.1.04.12.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.789.554,00	-	(1.789.554,00)
1.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	1.789.554,00	-	(1.789.554,00)
1.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	2.324.000.000,00	947.308.395,60	40,76	1.376.691.604,40
1.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	184.245.164,00	-	(184.245.164,00)
1.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	184.245.164,00	-	(184.245.164,00)
1.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN	2.324.000.000,00	763.063.231,60	32,83	1.560.936.768,40
1.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.324.000.000,00	763.063.231,60	32,83	1.560.936.768,40
1.1.04.16.	Pendapatan BLUD	57.606.693.541,00	70.530.038.833,93	122,43	(12.923.345.292,93)
1.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.606.693.541,00	70.530.038.833,93	122,43	(12.923.345.292,93)
1.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.606.693.541,00	70.530.038.833,93	122,43	(12.923.345.292,93)
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.381.364.144.728,00	1.297.581.177.757,00	93,93	83.782.966.971,00
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.234.205.782.028,00	1.205.400.510.475,00	97,67	28.805.271.553,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.046.367.629.028,00	1.017.562.357.475,00	97,25	28.805.271.553,00
1.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	181.331.280.000,00	181.331.422.620,00	100,00	(142.620,00)
1.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	40.328.377.000,00	46.923.087.000,00	116,35	(6.594.710.000,00)
1.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.604.669.000,00	10.903.434.000,00	102,82	(298.765.000,00)
1.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	1.542.733.000,00	-	(1.542.733.000,00)
1.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	142.620,00	-	(142.620,00)
1.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	98.095.265.000,00	71.616.674.000,00	73,01	26.478.591.000,00
1.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	8.464.206.000,00	-	(8.464.206.000,00)
1.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	212.749.000,00	-	(212.749.000,00)
1.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	10.817.612.000,00	20.183.040.000,00	186,58	(9.365.428.000,00)
1.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.325.829.000,00	5.325.829.000,00	100,00	-
1.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	-
1.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	15.015.686.000,00	15.015.686.000,00	100,00	-
1.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673.913.242.000,00	664.907.572.978,00	98,66	9.005.669.022,00
1.2.01.01.02.0001	DAU	673.913.242.000,00	664.907.572.978,00	98,66	9.005.669.022,00
1.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.007.100.028,00	24.914.813.590,00	92,25	2.092.286.438,00
1.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	275.667.000,00	274.642.700,00	99,63	1.024.300,00
1.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.804.652.994,00	3.570.314.600,00	74,31	1.234.338.394,00
1.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.444.203.000,00	1.857.147.975,00	75,98	587.055.025,00
1.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.961.462.034,00	1.922.073.400,00	97,99	39.388.634,00
1.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	129.368.000,00	115.353.000,00	89,17	14.015.000,00
1.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.391.747.000,00	17.175.281.915,00	98,76	216.465.085,00
1.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	164.116.007.000,00	146.408.548.287,00	89,21	17.707.458.713,00
1.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.288.600.000,00	41.470.921.419,00	91,57	3.817.678.581,00
1.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.770.000.000,00	1.600.000.000,00	90,40	170.000.000,00
1.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.485.442.000,00	79.485.442.000,00	100,00	-
1.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.153.217.000,00	3.153.217.000,00	100,00	-
1.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.862.958.000,00	1.862.958.000,00	100,00	-
1.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.822.400.000,00	5.820.000.000,00	99,96	2.400.000,00
1.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	473.700.000,00	437.800.000,00	92,42	35.900.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.258.557.000,00	8.492.938.470,00	41,92	11.765.618.530,00
1.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	569.981.000,00	500.517.000,00	87,81	69.464.000,00
1.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.089.152.000,00	3.437.248.398,00	67,54	1.651.903.602,00
1.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000,00	147.506.000,00	43,13	194.494.000,00
1.2.01.05.	Dana Desa	180.683.852.000,00	180.683.852.000,00	100,00	-
1.2.01.05.01.	Dana Desa	180.683.852.000,00	180.683.852.000,00	100,00	-
1.2.01.05.01.0001	Dana Desa	180.683.852.000,00	180.683.852.000,00	100,00	-
1.2.01.06.	Insentif Fiskal	7.154.301.000,00	7.154.301.000,00	100,00	-
1.2.01.06.01.	Insentif Fiskal	7.154.301.000,00	7.154.301.000,00	100,00	-
1.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.154.301.000,00	7.154.301.000,00	100,00	-
1.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.158.362.700,00	92.180.667.282,00	62,64	54.977.695.418,00
1.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	140.478.612.700,00	87.491.817.282,00	62,28	52.986.795.418,00
1.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.478.612.700,00	87.491.817.282,00	62,28	52.986.795.418,00
1.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.199.856.770,00	17.066.984.683,00	62,75	10.132.872.087,00
1.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	42.206.479.855,00	13.057.658.367,00	30,94	29.148.821.488,00
1.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.335.814.415,00	31.561.614.196,00	80,24	7.774.200.219,00
1.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.981.255.492,00	860.540.833,00	43,43	1.120.714.659,00
1.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.755.206.168,00	24.945.019.203,00	83,83	4.810.186.965,00
1.2.02.02.	Bantuan Keuangan	6.679.750.000,00	4.688.850.000,00	70,19	1.990.900.000,00
1.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.679.750.000,00	4.688.850.000,00	70,19	1.990.900.000,00
1.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.679.750.000,00	4.688.850.000,00	70,19	1.990.900.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	2.010.600,00	-	(2.010.600,00)
1.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	2.010.600,00	-	(2.010.600,00)
1.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	-	2.010.600,00	-	(2.010.600,00)
1.3.03.01.02.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	2.010.600,00	-	(2.010.600,00)
1.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	2.010.600,00	-	(2.010.600,00)
2.	BELANJA DAERAH	1.816.122.140.216,00	1.582.481.329.816,47	87,14	233.640.810.399,53
2.1.	BELANJA OPERASI	1.246.696.019.440,52	1.138.302.433.999,38	91,31	108.393.585.441,14
2.1.01.	Belanja Pegawai	687.437.913.860,88	669.213.552.493,00	97,35	18.224.361.367,88
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	420.429.894.488,94	412.030.862.747,00	98,00	8.399.031.741,94

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	305.717.302.671,12	305.221.479.809,00	99,84	495.822.862,12
2.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	251.941.940.400,12	251.487.150.131,00	99,82	454.790.269,12
2.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	53.775.362.271,00	53.734.329.678,00	99,92	41.032.593,00
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.228.880.104,14	30.006.482.208,00	99,26	222.397.896,14
2.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.648.965.354,14	24.563.634.228,00	99,65	85.331.126,14
2.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.579.914.750,00	5.442.847.980,00	97,54	137.066.770,00
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.554.362.044,00	5.468.596.650,00	98,46	85.765.394,00
2.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.554.362.044,00	5.468.596.650,00	98,46	85.765.394,00
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.106.926.236,94	27.613.829.082,00	98,25	493.097.154,94
2.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.220.211.234,94	22.727.114.082,00	97,88	493.097.152,94
2.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.886.715.002,00	4.886.715.000,00	100,00	2,00
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.550.797.323,24	2.224.994.447,00	87,23	325.802.876,24
2.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.055.882.323,24	1.732.333.447,00	84,26	323.548.876,24
2.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	494.915.000,00	492.661.000,00	99,54	2.254.000,00
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.374.947.292,20	17.180.666.899,00	98,88	194.280.393,20
2.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.615.031.722,20	13.543.806.919,00	99,48	71.224.803,20
2.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.759.915.570,00	3.636.859.980,00	96,73	123.055.590,00
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	806.988.610,94	722.933.005,00	89,58	84.055.605,94
2.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	806.988.610,94	722.933.005,00	89,58	84.055.605,94
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.983.102,06	4.198.495,00	84,25	784.607,06
2.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.999.027,06	3.240.754,00	81,04	758.273,06
2.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	984.075,00	957.741,00	97,32	26.334,00
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.523.559.039,54	21.052.297.291,00	76,49	6.471.261.748,54
2.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.458.109.084,54	19.355.796.420,00	76,03	6.102.312.664,54
2.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.065.449.955,00	1.696.500.871,00	82,14	368.949.084,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	637.140.095,72	634.610.478,00	99,60	2.529.617,72
2.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	518.479.942,72	516.597.190,00	99,64	1.882.752,72
2.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	118.660.153,00	118.013.288,00	99,45	646.865,00
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.924.007.969,04	1.900.774.383,00	98,79	23.233.586,04
2.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.568.041.324,04	1.546.769.964,00	98,64	21.271.360,04
2.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	355.966.645,00	354.004.419,00	99,45	1.962.226,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	150.027.697.523,94	146.061.030.136,00	97,36	3.966.667.387,94

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	104.177.664.814,98	100.747.010.020,00	96,71	3.430.654.794,98
2.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98.701.261.414,98	96.909.248.020,00	98,18	1.792.013.394,98
2.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.476.403.400,00	3.837.762.000,00	70,08	1.638.641.400,00
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.808.071.735,00	5.782.105.869,00	99,55	25.965.866,00
2.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.808.071.735,00	5.782.105.869,00	99,55	25.965.866,00
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.751.314.383,00	1.743.427.454,00	99,55	7.886.929,00
2.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.751.314.383,00	1.743.427.454,00	99,55	7.886.929,00
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	38.290.646.590,96	37.788.486.793,00	98,69	502.159.797,96
2.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	38.290.646.590,96	37.788.486.793,00	98,69	502.159.797,96
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92.779.664.594,00	85.756.062.103,00	92,43	7.023.602.491,00
2.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.320.668.755,00	1.171.297.181,00	88,69	149.371.574,00
2.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.385.000,00	5.385.000,00	100,00	-
2.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.942.576,00	8.378.963,00	49,46	8.563.613,00
2.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.012.500,00	7.012.500,00	58,38	5.000.000,00
2.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	729.720.000,00	699.720.000,00	95,89	30.000.000,00
2.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	18.675.000,00	8.325.000,00	44,58	10.350.000,00
2.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.725.000,00	7.987.500,00	58,20	5.737.500,00
2.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	248.583.679,00	158.863.218,00	63,91	89.720.461,00
2.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	275.625.000,00	275.625.000,00	100,00	-
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	211.234.467,00	132.406.422,00	62,68	78.828.045,00
2.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	21.118.864,00	12.961.683,00	61,37	8.157.181,00
2.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.062.500,00	5.062.500,00	100,00	-
2.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	16.734.146,00	7.607.532,00	45,46	9.126.614,00
2.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	29.092.094,00	21.459.094,00	73,76	7.633.000,00
2.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.889.113,00	2.889.113,00	74,29	1.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.295.000,00	2.295.000,00	100,00	-
2.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.341.500,00	841.500,00	62,73	500.000,00
2.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.168.750,00	1.923.750,00	88,70	245.000,00
2.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.382.500,00	11.216.250,00	90,58	1.166.250,00
2.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	116.150.000,00	66.150.000,00	56,95	50.000.000,00
2.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.485.442.000,00	73.764.879.100,00	92,80	5.720.562.900,00
2.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	79.485.442.000,00	73.764.879.100,00	92,80	5.720.562.900,00
2.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.862.958.000,00	1.862.879.400,00	100,00	78.600,00
2.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.862.958.000,00	1.862.879.400,00	100,00	78.600,00
2.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.153.217.000,00	2.958.500.000,00	93,82	194.717.000,00
2.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.153.217.000,00	2.958.500.000,00	93,82	194.717.000,00
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	6.277.144.372,00	5.484.540.000,00	87,37	792.604.372,00
2.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.893.687.672,00	5.255.220.000,00	89,17	638.467.672,00
2.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	381.706.700,00	228.320.000,00	59,82	153.386.700,00
2.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.750.000,00	1.000.000,00	57,14	750.000,00
2.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	469.000.000,00	381.560.000,00	81,36	87.440.000,00
2.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	21.500.000,00	20.500.000,00	95,35	1.000.000,00
2.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	447.500.000,00	361.060.000,00	80,68	86.440.000,00
2.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.287.286.656,00	19.725.721.515,00	97,23	561.565.141,00
2.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	777.040.000,00	756.105.000,00	97,31	20.935.000,00
2.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	777.040.000,00	756.105.000,00	97,31	20.935.000,00
2.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	66.868.200,00	61,07	42.617.400,00
2.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	66.868.200,00	61,07	42.617.400,00
2.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	83.500.260,00	58,83	58.442.940,00
2.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	83.500.260,00	58,83	58.442.940,00
2.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	64.753.500,00	82,80	13.450.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	64.753.500,00	82,80	13.450.500,00
2.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.096.352.250,00	96,68	37.605.750,00
2.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.096.352.250,00	96,68	37.605.750,00
2.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.921.800,00	85.701.525,00	70,29	36.220.275,00
2.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.921.800,00	85.701.525,00	70,29	36.220.275,00
2.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.396.650,00	11.860.275,00	48,61	12.536.375,00
2.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.396.650,00	11.860.275,00	48,61	12.536.375,00
2.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.315.500.000,00	4.263.000.000,00	98,78	52.500.000,00
2.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.315.500.000,00	4.263.000.000,00	98,78	52.500.000,00
2.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	724.500.000,00	714.000.000,00	98,55	10.500.000,00
2.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	724.500.000,00	714.000.000,00	98,55	10.500.000,00
2.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.000.000,00	589.309,00	11,79	4.410.691,00
2.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.000.000,00	589.309,00	11,79	4.410.691,00
2.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	80.000,00	-	-	80.000,00
2.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	80.000,00	-	-	80.000,00
2.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.832.600.402,00	5.747.164.174,00	98,54	85.436.228,00
2.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	86.672.082,00	65.743.062,00	75,85	20.929.020,00
2.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00	1.554.084,00	82,80	322.812,00
2.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00	4.662.252,00	82,80	968.436,00
2.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.738.420.736,00	5.675.204.776,00	98,90	63.215.960,00
2.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.687.497.004,00	6.522.297.022,00	97,53	165.199.982,00
2.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.687.497.004,00	6.522.297.022,00	97,53	165.199.982,00
2.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	313.530.000,00	93,55	21.630.000,00
2.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	313.530.000,00	93,55	21.630.000,00
2.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	428.332.264,00	262.879.883,00	61,37	165.452.381,00
2.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00	25.200.000,00	85,71	4.200.000,00
2.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00	25.200.000,00	85,71	4.200.000,00
2.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	3.528.000,00	85,71	588.000,00
2.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	3.528.000,00	85,71	588.000,00
2.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	45.360.000,00	85,71	7.560.000,00
2.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	45.360.000,00	85,71	7.560.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.476.160,00	85,71	579.360,00
2.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.476.160,00	85,71	579.360,00
2.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.173,00	334.325,00	45,29	403.848,00
2.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.173,00	334.325,00	45,29	403.848,00
2.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	593,00	544,00	91,74	49,00
2.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	593,00	544,00	91,74	49,00
2.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.963.520,00	2.469.600,00	83,33	493.920,00
2.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.963.520,00	2.469.600,00	83,33	493.920,00
2.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00	50.400,00	83,33	10.080,00
2.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00	50.400,00	83,33	10.080,00
2.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00	151.200,00	83,33	30.240,00
2.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00	151.200,00	83,33	30.240,00
2.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	286.219.980,00	172.275.229,00	60,19	113.944.751,00
2.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.498.125,00	1.077.000,00	71,89	421.125,00
2.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.344.814,00	1.607.348,00	36,99	2.737.466,00
2.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.828.125,00	-	-	1.828.125,00
2.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.324.325,00	1.402.500,00	22,18	4.921.825,00
2.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	108.851.538,00	99.210.000,00	91,14	9.641.538,00
2.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.381.875,00	1.665.000,00	38,00	2.716.875,00
2.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.452.188,00	1.597.500,00	35,88	2.854.688,00
2.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	703.125,00	-	-	703.125,00
2.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.687.500,00	-	-	10.687.500,00
2.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.882.740,00	10.590.881,00	31,26	23.291.859,00
2.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	109.265.625,00	55.125.000,00	50,45	54.140.625,00
2.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	47.676.558,00	10.034.425,00	21,05	37.642.133,00
2.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	773.438,00	-	-	773.438,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.547.002,00	730.779,00	47,24	816.223,00
2.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.587.500,00	337.500,00	13,04	2.250.000,00
2.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.680.391,00	507.169,00	30,18	1.173.222,00
2.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00
2.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	140.625,00	-	-	140.625,00
2.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.063,00	-	-	14.063,00
2.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00
2.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.663.894,00	2.771.269,00	16,63	13.892.625,00
2.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.058.169,00	192.608,00	9,36	1.865.561,00
2.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	574.875,00	153.000,00	26,61	421.875,00
2.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	365.625,00	-	-	365.625,00
2.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	216.413,00	56.100,00	25,92	160.313,00
2.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	953.438,00	128.250,00	13,45	825.188,00
2.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.353.625,00	747.750,00	11,77	5.605.875,00
2.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	11.497.500,00	4.410.000,00	38,36	7.087.500,00
2.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	672.480.000,00	437.000.000,00	64,98	235.480.000,00
2.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	77.000.000,00	24,64	235.480.000,00
2.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	77.000.000,00	24,64	235.480.000,00
2.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	-
2.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	2.812.558.334,00	4.939.996.109,00	175,64	(2.127.437.775,00)
2.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	2.812.558.334,00	4.939.996.109,00	175,64	(2.127.437.775,00)
2.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.812.558.334,00	4.939.996.109,00	175,64	(2.127.437.775,00)
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	492.634.779.420,64	411.317.163.276,38	83,49	81.317.616.144,26
2.1.02.01.	Belanja Barang	103.972.695.581,00	65.528.615.920,88	63,02	38.444.079.660,12
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	103.812.825.918,00	65.473.881.920,88	63,07	38.338.943.997,12
2.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.525.800,00	22.345.800,00	99,20	180.000,00
2.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.309.517.534,00	877.325.600,00	67,00	432.191.934,00
2.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.923.037.068,00	2.728.792.818,00	55,43	2.194.244.250,00
2.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	40.977.220,00	33.396.500,00	81,50	7.580.720,00
2.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	100,00	-
2.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.875.000,00	595.000,00	20,70	2.280.000,00
2.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	73.000.000,00	41.944.000,00	57,46	31.056.000,00
2.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.496.415.033,00	3.704.008.071,00	49,41	3.792.406.962,00
2.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-
2.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.972.335.752,00	8.968.800.204,00	74,91	3.003.535.548,00
2.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.962.036.772,00	1.542.007.457,00	78,59	420.029.315,00
2.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	933.231.482,00	754.954.000,00	80,90	178.277.482,00
2.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	91.828.000,00	71.400.000,00	77,75	20.428.000,00
2.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.893.364.495,00	1.676.843.900,00	88,56	216.520.595,00
2.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.045.022.527,00	798.582.291,00	76,42	246.440.236,00
2.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	451.808.794,00	356.277.930,00	78,86	95.530.864,00
2.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	90.000.000,00	89.925.000,00	99,92	75.000,00
2.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.186.700,00	20.186.700,00	100,00	-
2.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	353.500.000,00	310.750.000,00	87,91	42.750.000,00
2.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	597.930.000,00	557.405.985,88	93,22	40.524.014,12
2.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.513.401.881,00	2.306.959.048,00	35,42	4.206.442.833,00
2.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.495.567.720,00	6.726.799.972,00	64,09	3.768.767.748,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	24.085.497.650,00	10.899.634.632,00	45,25	13.185.863.018,00
2.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.244.386.000,00	1.125.959.000,00	90,48	118.427.000,00
2.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	81.214.000,00	80.649.200,00	99,30	564.800,00
2.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.593.607.250,00	9.357.982.800,00	74,31	3.235.624.450,00
2.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.544.020.000,00	2.449.835.000,00	96,30	94.185.000,00
2.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.538.988.020,00	1.663.811.866,00	65,53	875.176.154,00
2.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	75.592.000,00	66.722.000,00	88,27	8.870.000,00
2.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.095.124.220,00	4.533.752.400,00	88,98	561.371.820,00
2.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	11.700.000,00	-	-	11.700.000,00
2.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	68.000.000,00	-	-	68.000.000,00
2.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	147.220.000,00	-	-	147.220.000,00
2.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	146.200.000,00	-	-	146.200.000,00
2.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.152.000,00	52.184.900,00	29,79	122.967.100,00
2.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.431.210.000,00	781.865.260,00	54,63	649.344.740,00
2.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	165.675.000,00	42.150.000,00	25,44	123.525.000,00
2.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	-
2.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	954.138.000,00	870.382.000,00	91,22	83.756.000,00
2.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	784.600.000,00	780.080.000,00	99,42	4.520.000,00
2.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.076.570.000,00	887.272.586,00	82,42	189.297.414,00
2.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	233.470.000,00	220.400.000,00	94,40	13.070.000,00
2.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.869.663,00	2.860.000,00	99,66	9.663,00
2.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.869.663,00	2.860.000,00	99,66	9.663,00
2.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	157.000.000,00	51.874.000,00	33,04	105.126.000,00
2.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	105.000.000,00	-	-	105.000.000,00
2.1.02.01.04.0371	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.02.01.04.0571	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50.000.000,00	49.874.000,00	99,75	126.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.04.0652	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.	Belanja Jasa	198.871.415.311,84	165.983.842.500,00	83,46	32.887.572.811,84
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	142.119.991.346,50	117.794.950.326,00	82,88	24.325.041.020,50
2.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.752.850.000,00	1.717.600.000,00	62,39	1.035.250.000,00
2.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	989.770.000,00	935.120.000,00	94,48	54.650.000,00
2.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	466.500.000,00	403.500.000,00	86,50	63.000.000,00
2.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.975.271.000,00	2.828.271.000,00	95,06	147.000.000,00
2.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	2.000.000,00	55,56	1.600.000,00
2.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.485.000,00	-	-	39.485.000,00
2.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	67.000.000,00	56.800.000,00	84,78	10.200.000,00
2.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	470.000.000,00	460.400.000,00	97,96	9.600.000,00
2.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	32.413.000.000,00	26.081.441.750,00	80,47	6.331.558.250,00
2.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.548.797.000,00	12.040.900.992,00	82,76	2.507.896.008,00
2.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	76.850.000,00	69.600.000,00	90,57	7.250.000,00
2.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.261.920.000,00	4.362.400.000,00	69,67	1.899.520.000,00
2.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.515.000.000,00	5.032.900.000,00	77,25	1.482.100.000,00
2.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.850.350.000,00	1.573.700.000,00	85,05	276.650.000,00
2.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.502.200.000,00	1.132.250.000,00	75,37	369.950.000,00
2.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	671.000.000,00	583.600.000,00	86,97	87.400.000,00
2.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	653.950.000,00	590.150.000,00	90,24	63.800.000,00
2.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.359.560.000,00	1.133.610.000,00	83,38	225.950.000,00
2.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	56.250.000,00	56.250.000,00	100,00	-
2.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	-
2.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.705.625.026,50	13.790.000.000,00	87,80	1.915.625.026,50
2.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.430.750.000,00	1.286.300.000,00	89,90	144.450.000,00
2.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.654.111.225,00	4.913.376.255,00	86,90	740.734.970,00
2.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.326.519.000,00	1.791.528.800,00	53,86	1.534.990.200,00
2.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.797.970.000,00	12.850.489.000,00	86,84	1.947.481.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.168.000.000,00	1.954.600.000,00	90,16	213.400.000,00
2.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	937.500.000,00	829.550.000,00	88,49	107.950.000,00
2.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	425.020.650,00	234.618.209,00	55,20	190.402.441,00
2.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	34.800.000,00	29.000.000,00	83,33	5.800.000,00
2.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	53.400.000,00	38.400.000,00	71,91	15.000.000,00
2.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.208.000.000,00	1.104.194.850,00	91,41	103.805.150,00
2.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	177.142.500,00	166.547.000,00	94,02	10.595.500,00
2.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
2.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	351.000.000,00	159.922.000,00	45,56	191.078.000,00
2.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.337.205.000,00	2.971.452.350,00	89,04	365.752.650,00
2.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	44.928.000,00	38.728.000,00	86,20	6.200.000,00
2.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	207.156.800,00	36.664.000,00	17,70	170.492.800,00
2.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.770.750.000,00	1.471.650.000,00	83,11	299.100.000,00
2.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	72.900.000,00	62.364.414,00	85,55	10.535.586,00
2.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.326.000,00	15.436.300,00	69,14	6.889.700,00
2.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.822.156.191,00	12.275.535.963,00	95,74	546.620.228,00
2.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	438.648.333,00	382.123.410,00	87,11	56.524.923,00
2.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.297.868.840,00	2.263.142.252,00	68,62	1.034.726.588,00
2.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.432.000,00	1.550.000,00	11,54	11.882.000,00
2.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	44.625.000,00	36.500.000,00	81,79	8.125.000,00
2.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.853.781,00	2.853.781,00	100,00	-
2.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	80.500.000,00	9.180.000,00	11,40	71.320.000,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.758.090.438,34	27.990.022.827,00	97,33	768.067.611,34
2.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.024.273.152,00	2.574.647.736,00	85,13	449.625.416,00
2.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	22.638.400.012,13	22.630.841.300,00	99,97	7.558.712,13
2.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	331.008.092,66	306.720.400,00	92,66	24.287.692,66
2.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.034.973,00	-	-	21.034.973,00
2.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	446.706.643,86	326.397.894,14	73,07	120.308.749,72
2.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	541.779.564,69	396.588.296,86	73,20	145.191.267,83

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.044.600.000,00	1.044.540.000,00	99,99	60.000,00
2.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	710.288.000,00	710.287.200,00	100,00	800,00
2.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	303.000.000,00	303.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	303.000.000,00	303.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.865.769.500,00	3.820.520.998,00	78,52	1.045.248.502,00
2.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	47.362.000,00	-	-	47.362.000,00
2.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	2.786.000,00	-	-	2.786.000,00
2.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	54.000.000,00	36.000.000,00	66,67	18.000.000,00
2.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	50.600.000,00	40.100.000,00	79,25	10.500.000,00
2.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.045.600.000,00	933.849.998,00	89,31	111.750.002,00
2.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	260.266.500,00	55.000.000,00	21,13	205.266.500,00
2.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	80.400.000,00	80.400.000,00	100,00	-
2.1.02.02.04.0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.210.155.000,00	1.053.261.000,00	87,04	156.894.000,00
2.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	96.000.000,00	6.000.000,00	6,25	90.000.000,00
2.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.142.100.000,00	986.910.000,00	86,41	155.190.000,00
2.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	286.500.000,00	39.000.000,00	13,61	247.500.000,00
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	929.519.375,00	467.456.000,00	50,29	462.063.375,00
2.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	806.600.000,00	344.606.000,00	42,72	461.994.000,00
2.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	38.919.375,00	38.850.000,00	99,82	69.375,00
2.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	74.100.000,00	74.100.000,00	100,00	-
2.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	74.100.000,00	74.100.000,00	100,00	-
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.675.303.690,00	10.043.532.022,00	64,07	5.631.771.668,00
2.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.915.768.586,00	3.093.131.168,00	78,99	822.637.418,00
2.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10.000.000,00	9.967.000,00	99,67	33.000,00
2.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	262.536.320,00	245.426.603,00	93,48	17.109.717,00
2.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	289.000.000,00	288.723.372,00	99,90	276.628,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	720.000.000,00	715.719.000,00	99,41	4.281.000,00
2.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.680.572.500,00	2.371.398.118,00	88,47	309.174.382,00
2.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	300.000.000,00	178.228.260,00	59,41	121.771.740,00
2.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	365.508.800,00	268.790.000,00	73,54	96.718.800,00
2.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.260.279.984,00	634.462.200,00	28,07	1.625.817.784,00
2.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.184.137.500,00	1.768.782.501,00	42,27	2.415.354.999,00
2.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	620.000.000,00	468.903.800,00	75,63	151.096.200,00
2.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	67.500.000,00	-	-	67.500.000,00
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.592.500.000,00	1.536.945.127,00	96,51	55.554.873,00
2.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.592.500.000,00	1.536.945.127,00	96,51	55.554.873,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.525.040.962,00	3.925.315.200,00	86,75	599.725.762,00
2.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21.375.000,00	21.375.000,00	100,00	-
2.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.384.665.962,00	3.784.940.200,00	86,32	599.725.762,00
2.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	119.000.000,00	119.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	28.100.000,00	28.000.000,00	99,64	100.000,00
2.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	28.100.000,00	28.000.000,00	99,64	100.000,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	25.341.539.491,00	19.268.845.503,00	76,04	6.072.693.988,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.130.497.970,00	8.237.473.517,00	74,01	2.893.024.453,00
2.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	91.550.000,00	54.638.030,00	59,68	36.911.970,00
2.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	198.000.000,00	147.135.206,00	74,31	50.864.794,00
2.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	248.400.000,00	100.293.530,00	40,38	148.106.470,00
2.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	50.400.000,00	16.795.600,00	33,32	33.604.400,00
2.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	30.000.000,00	960.000,00	3,20	29.040.000,00
2.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	109.050.000,00	70.490.000,00	64,64	38.560.000,00
2.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	36.000.000,00	35.786.400,00	99,41	213.600,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.080.649.024,00	3.539.988.835,00	86,75	540.660.189,00
2.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.334.192.115,00	1.173.930.147,00	87,99	160.261.968,00
2.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.996.957.956,00	1.268.123.479,00	63,50	728.834.477,00
2.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.565.944,00	26.972.120,00	33,07	54.593.824,00
2.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.028.200,00	68.507.499,00	97,83	1.520.701,00
2.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	112.320.214,00	99.248.743,00	88,36	13.071.471,00
2.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	9.702.500,00	-	-	9.702.500,00
2.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10.120.000,00	10.120.000,00	100,00	-
2.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.433.000,00	8.432.000,00	54,64	7.001.000,00
2.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	106.120.000,00	6.120.000,00	5,77	100.000.000,00
2.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	2.200.000,00	2.146.000,00	97,55	54.000,00
2.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00
2.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	76.978.500,00	-	-	76.978.500,00
2.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	61.002.008,00	56.800.000,00	93,11	4.202.008,00
2.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	676.119.500,00	481.473.581,00	71,21	194.645.919,00
2.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	2.585.000,00	86,17	415.000,00
2.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	70.000.000,00	59.280.000,00	84,69	10.720.000,00
2.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	26.000.000,00	9.645.000,00	37,10	16.355.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	17.275.702,00	17.265.000,00	99,94	10.702,00
2.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	8.550.000,00	7.570.500,00	88,54	979.500,00
2.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	365.457.156,00	284.305.591,00	77,79	81.151.565,00
2.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	147.710.000,00	26.440.000,00	17,90	121.270.000,00
2.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	302.116.151,00	226.421.969,00	74,95	75.694.182,00
2.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	60.000.000,00	29.828.250,00	49,71	30.171.750,00
2.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	723.400.000,00	403.171.037,00	55,73	320.228.963,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.252.538.505,00	2.128.632.996,00	65,45	1.123.905.509,00
2.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.846.674.337,00	1.789.347.318,00	62,86	1.057.327.019,00
2.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	109.665.000,00	109.585.178,00	99,93	79.822,00
2.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	85.697.000,00	85.458.000,00	99,72	239.000,00
2.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50.502.168,00	49.330.000,00	97,68	1.172.168,00
2.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	45.000.000,00	44.981.500,00	99,96	18.500,00
2.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	115.000.000,00	49.931.000,00	43,42	65.069.000,00
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.958.503.016,00	8.902.738.990,00	81,24	2.055.764.026,00
2.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	6.576.936.956,00	4.613.911.000,00	70,15	1.963.025.956,00
2.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.948.319.600,00	1.899.543.000,00	97,50	48.776.600,00
2.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	699.000.000,00	697.560.600,00	99,79	1.439.400,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	150.000.000,00	149.872.200,00	99,91	127.800,00
2.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	528.839.850,00	497.995.500,00	94,17	30.844.350,00
2.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	566.356.610,00	556.634.697,00	98,28	9.721.913,00
2.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	129.050.000,00	127.297.000,00	98,64	1.753.000,00
2.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	360.000.000,00	359.924.993,00	99,98	75.007,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	72.222.150.409,00	58.263.088.717,00	80,67	13.959.061.692,00
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.051.930.409,00	58.092.891.956,00	80,63	13.959.038.453,00
2.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.067.515.678,00	42.080.409.659,00	82,40	8.987.106.019,00
2.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.414.329.731,00	14.888.158.297,00	76,69	4.526.171.434,00
2.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	994.759.000,00	760.690.000,00	76,47	234.069.000,00
2.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	575.326.000,00	363.634.000,00	63,20	211.692.000,00
2.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.220.000,00	170.196.761,00	99,99	23.239,00
2.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	170.220.000,00	170.196.761,00	99,99	23.239,00
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.132.802.000,00	13.170.810.000,00	76,87	3.961.992.000,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.016.555.000,00	6.360.703.000,00	79,34	1.655.852.000,00
2.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.782.065.000,00	3.577.753.000,00	94,60	204.312.000,00
2.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	69.650.000,00	69.000.000,00	99,07	650.000,00
2.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.164.840.000,00	2.713.950.000,00	65,16	1.450.890.000,00
2.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.116.247.000,00	6.810.107.000,00	74,70	2.306.140.000,00
2.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	395.970.000,00	374.605.000,00	94,60	21.365.000,00
2.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.720.277.000,00	6.435.502.000,00	73,80	2.284.775.000,00
2.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.099.036.386,00	32.039.016.321,00	96,80	1.060.020.065,00
2.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.099.036.386,00	32.039.016.321,00	96,80	1.060.020.065,00
2.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.099.036.386,00	32.039.016.321,00	96,80	1.060.020.065,00
2.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.995.140.241,80	57.062.944.314,50	135,88	(15.067.804.072,70)
2.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.995.140.241,80	57.062.944.314,50	135,88	(15.067.804.072,70)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.995.140.241,80	57.062.944.314,50	135,88	(15.067.804.072,70)
2.1.05.	Belanja Hibah	65.298.526.159,00	57.771.718.230,00	88,47	7.526.807.929,00
2.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.573.886.909,00	37.565.948.264,00	94,93	2.007.938.645,00
2.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.932.065.686,00	34.932.065.686,00	100,00	-
2.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.932.065.686,00	34.932.065.686,00	100,00	-
2.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.641.821.223,00	2.633.882.578,00	56,74	2.007.938.645,00
2.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.641.821.223,00	2.633.882.578,00	56,74	2.007.938.645,00
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.964.589.250,00	11.285.719.966,00	87,05	1.678.869.284,00
2.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.548.970.600,00	5.391.663.816,00	82,33	1.157.306.784,00
2.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.548.970.600,00	5.391.663.816,00	82,33	1.157.306.784,00
2.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.000.000,00	60.000.000,00	85,71	10.000.000,00
2.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.000.000,00	60.000.000,00	85,71	10.000.000,00
2.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.195.618.650,00	5.684.056.150,00	91,74	511.562.500,00
2.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.505.312.500,00	4.993.750.000,00	90,71	511.562.500,00
2.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	690.306.150,00	690.306.150,00	100,00	-
2.1.05.05.06.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
2.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
2.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	3.801.700.000,00	-	-	3.801.700.000,00
2.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.801.700.000,00	-	-	3.801.700.000,00
2.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.801.700.000,00	-	-	3.801.700.000,00
2.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.662.250.000,00	2.662.250.000,00	100,00	-
2.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.662.250.000,00	2.662.250.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.662.250.000,00	2.662.250.000,00	100,00	-
2.1.05.08.	Belanja Hibah Dana BOSP	6.296.100.000,00	6.257.800.000,00	99,39	38.300.000,00
2.1.05.08.02.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.822.400.000,00	5.820.000.000,00	99,96	2.400.000,00
2.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.822.400.000,00	5.820.000.000,00	99,96	2.400.000,00
2.1.05.08.03.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	473.700.000,00	437.800.000,00	92,42	35.900.000,00
2.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	473.700.000,00	437.800.000,00	92,42	35.900.000,00
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.324.800.000,00	-	-	1.324.800.000,00
2.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.324.800.000,00	-	-	1.324.800.000,00
2.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.324.800.000,00	-	-	1.324.800.000,00
2.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.324.800.000,00	-	-	1.324.800.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	277.877.583.574,20	194.934.007.141,09	70,15	82.943.576.433,11
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.690.031.715,20	59.972.908.137,36	64,70	32.717.123.577,84
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	8.313.638.650,00	7.193.200.760,00	86,52	1.120.437.890,00
2.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	8.265.000.000,00	7.157.890.000,00	86,60	1.107.110.000,00
2.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	2.750.000.000,00	2.730.000.000,00	99,27	20.000.000,00
2.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.650.000.000,00	1.608.390.000,00	97,48	41.610.000,00
2.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
2.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	1.800.000.000,00	1.755.500.000,00	97,53	44.500.000,00
2.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.065.000.000,00	1.064.000.000,00	99,91	1.000.000,00
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	48.638.650,00	35.310.760,00	72,60	13.327.890,00
2.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	48.638.650,00	35.310.760,00	72,60	13.327.890,00
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	17.780.947.144,00	16.747.114.640,00	94,19	1.033.832.504,00
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.350.602.144,00	16.329.450.000,00	94,11	1.021.152.144,00
2.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.552.800.000,00	3.466.800.000,00	97,58	86.000.000,00
2.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.266.480.000,00	899.200.000,00	71,00	367.280.000,00
2.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.213.836.000,00	5.909.480.000,00	95,10	304.356.000,00
2.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	308.400.000,00	81.370.000,00	26,38	227.030.000,00
2.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	160.000.000,00	158.000.000,00	98,75	2.000.000,00
2.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.741.181.044,00	5.715.600.000,00	99,55	25.581.044,00
2.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	107.905.100,00	99.000.000,00	91,75	8.905.100,00
2.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100.000.000,00	98.964.640,00	98,96	1.035.360,00
2.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	100.000.000,00	98.964.640,00	98,96	1.035.360,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	320.345.000,00	318.700.000,00	99,49	1.645.000,00
2.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	196.600.000,00	195.800.000,00	99,59	800.000,00
2.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	123.745.000,00	122.900.000,00	99,32	845.000,00
2.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
2.2.02.02.04.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
2.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.016.600,00	18.105.000,00	58,37	12.911.600,00
2.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.845.000,00	18.105.000,00	72,87	6.740.000,00
2.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	7.350.000,00	7.300.000,00	99,32	50.000,00
2.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.495.000,00	2.480.000,00	99,40	15.000,00
2.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.000.000,00	8.325.000,00	55,50	6.675.000,00
2.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	6.171.600,00	-	-	6.171.600,00
2.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	6.171.600,00	-	-	6.171.600,00
2.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85	1.300.000,00
2.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85	1.300.000,00
2.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85	1.300.000,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.312.138.353,00	9.590.099.939,36	77,89	2.722.038.413,64
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.978.971.665,00	1.280.292.274,36	64,69	698.679.390,64
2.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	531.104.573,00	408.705.685,00	76,95	122.398.888,00
2.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.447.867.092,00	871.586.589,36	60,20	576.280.502,64
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.887.108.412,00	8.015.826.765,00	81,07	1.871.281.647,00
2.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.395.440.468,00	6.538.035.743,00	88,41	857.404.725,00
2.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	73.800.000,00	62.869.384,00	85,19	10.930.616,00
2.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	794.299.325,00	531.599.788,00	66,93	262.699.537,00
2.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	70.833.000,00	65.620.350,00	92,64	5.212.650,00
2.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.209.513.717,00	795.499.100,00	65,77	414.014.617,00
2.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	343.221.902,00	22.202.400,00	6,47	321.019.502,00
2.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	446.058.276,00	293.980.900,00	65,91	152.077.376,00
2.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	221.700.000,00	109.500.000,00	49,39	112.200.000,00
2.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
2.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	99.838.264,00	85.640.900,00	85,78	14.197.364,00
2.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.381.234,00	-	-	2.381.234,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	114.138.778,00	98.840.000,00	86,60	15.298.778,00
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.003.136.649,00	665.847.739,00	66,38	337.288.910,00
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	858.644.899,00	532.902.739,00	62,06	325.742.160,00
2.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	-
2.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	792.244.899,00	466.564.000,00	58,89	325.680.899,00
2.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	37.000.000,00	36.938.739,00	99,83	61.261,00
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	144.491.750,00	132.945.000,00	92,01	11.546.750,00
2.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	144.491.750,00	132.945.000,00	92,01	11.546.750,00
2.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.717.363.344,00	5.919.499.322,00	22,16	20.797.864.022,00
2.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	24.436.006.500,00	4.193.948.064,00	17,16	20.242.058.436,00
2.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.755.594.278,00	2.223.901.264,00	80,70	531.693.014,00
2.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.125.000.000,00	1.066.400.000,00	94,79	58.600.000,00
2.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	400.672.901,00	244.587.000,00	61,04	156.085.901,00
2.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	202.409.946,00	-	-	202.409.946,00
2.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.764.835.781,00	-	-	1.764.835.781,00
2.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	16.907.150.998,00	-	-	16.907.150.998,00
2.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.280.342.596,00	659.059.800,00	51,48	621.282.796,00
2.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.281.356.844,00	1.725.551.258,00	75,64	555.805.586,00
2.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.281.356.844,00	1.725.551.258,00	75,64	555.805.586,00
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.678.685.725,00	402.830.000,00	15,04	2.275.855.725,00
2.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.147.960.225,00	6.900.000,00	0,32	2.141.060.225,00
2.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	141.025.000,00	6.900.000,00	4,89	134.125.000,00
2.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	39.555.000,00	-	-	39.555.000,00
2.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	1.931.618.225,00	-	-	1.931.618.225,00
2.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	15.762.000,00	-	-	15.762.000,00
2.2.02.08.02.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	79.750.500,00	-	-	79.750.500,00
2.2.02.08.02.0003	Belanja Modal General Laboratory Tool	79.750.500,00	-	-	79.750.500,00
2.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	398.475.000,00	395.930.000,00	99,36	2.545.000,00
2.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	398.475.000,00	395.930.000,00	99,36	2.545.000,00
2.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	52.500.000,00	-	-	52.500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	52.500.000,00	-	-	52.500.000,00
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	10.293.941.849,00	7.361.227.327,00	71,51	2.932.714.522,00
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	8.706.555.785,00	6.572.803.510,00	75,49	2.133.752.275,00
2.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.706.555.785,00	6.572.803.510,00	75,49	2.133.752.275,00
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.587.386.064,00	788.423.817,00	49,67	798.962.247,00
2.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.138.161.064,00	788.423.817,00	69,27	349.737.247,00
2.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	449.225.000,00	-	-	449.225.000,00
2.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	902.827.100,00	605.016.300,00	67,01	297.810.800,00
2.2.02.13.01.	Belanja Modal Sumur	902.827.100,00	605.016.300,00	67,01	297.810.800,00
2.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	902.827.100,00	605.016.300,00	67,01	297.810.800,00
2.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	324.165.940,00	58.250.000,00	17,97	265.915.940,00
2.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	192.000.000,00	-	-	192.000.000,00
2.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	192.000.000,00	-	-	192.000.000,00
2.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	132.165.940,00	58.250.000,00	44,07	73.915.940,00
2.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	82.165.940,00	8.250.000,00	10,04	73.915.940,00
2.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
2.2.02.17.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	96.310.074,00	95.775.000,00	99,44	535.074,00
2.2.02.17.01.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	96.310.074,00	95.775.000,00	99,44	535.074,00
2.2.02.17.01.0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	96.310.074,00	95.775.000,00	99,44	535.074,00
2.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.900.500.000,00	4.247.824.946,00	86,68	652.675.054,00
2.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.900.500.000,00	4.247.824.946,00	86,68	652.675.054,00
2.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
2.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	65.200.000,00	64.060.000,00	98,25	1.140.000,00
2.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.435.300.000,00	4.183.764.946,00	94,33	251.535.054,00
2.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	363.300.500,00	361.740.009,00	99,57	1.560.491,00
2.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	363.300.500,00	361.740.009,00	99,57	1.560.491,00
2.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	90.832.300,00	90.616.071,00	99,76	216.229,00
2.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	219.270.700,00	218.926.188,00	99,84	344.512,00
2.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	25.357.500,00	25.113.750,00	99,04	243.750,00
2.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	27.840.000,00	27.084.000,00	97,28	756.000,00
2.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.323.110.129,00	3.558.115.429,00	107,07	(235.005.300,00)
2.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.323.110.129,00	3.558.115.429,00	107,07	(235.005.300,00)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.323.110.129,00	3.558.115.429,00	107,07	(235.005.300,00)
2.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.646.249.658,20	3.146.861.726,00	86,30	499.387.932,20
2.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.646.249.658,20	3.146.861.726,00	86,30	499.387.932,20
2.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.646.249.658,20	3.146.861.726,00	86,30	499.387.932,20
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.134.803.778,00	27.044.442.658,73	69,11	12.090.361.119,27
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.584.825.362,00	24.888.889.674,73	68,03	11.695.935.687,27
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.351.912.127,00	24.353.042.774,73	68,89	10.998.869.352,27
2.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.070.699.251,00	22.494.202.712,73	72,40	8.576.496.538,27
2.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.055.178.789,00	-	-	1.055.178.789,00
2.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.304.164.087,00	1.304.164.062,00	100,00	25,00
2.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.669.400.000,00	497.514.000,00	29,80	1.171.886.000,00
2.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	114.470.000,00	57.162.000,00	49,94	57.308.000,00
2.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	138.000.000,00	-	-	138.000.000,00
2.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.232.913.235,00	535.846.900,00	43,46	697.066.335,00
2.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.232.913.235,00	535.846.900,00	43,46	697.066.335,00
2.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	160.944.720,00	74.373.896,00	46,21	86.570.824,00
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	160.944.720,00	74.373.896,00	46,21	86.570.824,00
2.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	160.944.720,00	74.373.896,00	46,21	86.570.824,00
2.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.389.033.696,00	2.081.179.088,00	87,11	307.854.608,00
2.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.389.033.696,00	2.081.179.088,00	87,11	307.854.608,00
2.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.389.033.696,00	2.081.179.088,00	87,11	307.854.608,00
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.370.514.596,00	100.486.172.845,00	72,62	37.884.341.751,00
2.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	129.315.867.596,00	92.754.272.759,00	71,73	36.561.594.837,00
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	127.530.831.596,00	91.569.667.113,00	71,80	35.961.164.483,00
2.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	82.653.229.596,00	62.994.578.843,00	76,22	19.658.650.753,00
2.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	44.877.602.000,00	28.575.088.270,00	63,67	16.302.513.730,00
2.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	1.785.036.000,00	1.184.605.646,00	66,36	600.430.354,00
2.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.785.036.000,00	1.184.605.646,00	66,36	600.430.354,00
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	9.004.647.000,00	7.731.900.086,00	85,87	1.272.746.914,00
2.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.463.470.000,00	2.404.314.791,00	97,60	59.155.209,00
2.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.380.000.000,00	1.337.453.450,00	96,92	42.546.550,00
2.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.083.470.000,00	1.066.861.341,00	98,47	16.608.659,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.631.490.000,00	2.530.392.681,00	96,16	101.097.319,00
2.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.631.490.000,00	2.530.392.681,00	96,16	101.097.319,00
2.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.909.687.000,00	2.797.192.614,00	71,55	1.112.494.386,00
2.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.909.687.000,00	2.797.192.614,00	71,55	1.112.494.386,00
2.2.04.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.04.99.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.432.133.485,00	7.430.483.500,00	99,98	1.649.985,00
2.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	559.500.000,00	49.905.600,00	8,92	509.594.400,00
2.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	559.500.000,00	49.905.600,00	8,92	509.594.400,00
2.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	559.500.000,00	49.905.600,00	8,92	509.594.400,00
2.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.834.753.485,00	7.380.577.900,00	107,99	(545.824.415,00)
2.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.834.753.485,00	7.380.577.900,00	107,99	(545.824.415,00)
2.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.834.753.485,00	7.380.577.900,00	107,99	(545.824.415,00)
2.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	37.880.000,00	-	-	37.880.000,00
2.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	37.880.000,00	-	-	37.880.000,00
2.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	37.880.000,00	-	-	37.880.000,00
2.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	250.100.000,00	-	-	250.100.000,00
2.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.100.000,00	-	-	15.100.000,00
2.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.100.000,00	-	-	15.100.000,00
2.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	15.100.000,00	-	-	15.100.000,00
2.2.06.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	235.000.000,00	-	-	235.000.000,00
2.2.06.99.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	235.000.000,00	-	-	235.000.000,00
2.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	235.000.000,00	-	-	235.000.000,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	13.060.969.616,28
2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	13.060.969.616,28
2.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	13.060.969.616,28
2.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	13.060.969.616,28
2.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	13.060.969.616,28
2.4.	BELANJA TRANSFER	278.308.086.901,00	249.065.407.992,00	89,49	29.242.678.909,00
2.4.01.	Belanja Bagi Hasil	8.596.576.685,00	5.700.229.000,00	66,31	2.896.347.685,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.105.297.985,00	4.711.385.000,00	66,31	2.393.912.985,00
2.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.105.297.985,00	4.711.385.000,00	66,31	2.393.912.985,00
2.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.105.297.985,00	4.711.385.000,00	66,31	2.393.912.985,00
2.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.491.278.700,00	988.844.000,00	66,31	502.434.700,00
2.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.491.278.700,00	988.844.000,00	66,31	502.434.700,00
2.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.491.278.700,00	988.844.000,00	66,31	502.434.700,00
2.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	269.711.510.216,00	243.365.178.992,00	90,23	26.346.331.224,00
2.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.711.510.216,00	243.365.178.992,00	90,23	26.346.331.224,00
2.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.711.510.216,00	243.365.178.992,00	90,23	26.346.331.224,00
2.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	7.862.500.000,00	5.902.025.000,00	75,07	1.960.475.000,00
2.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	180.683.852.000,00	180.683.852.000,00	100,00	-
2.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	81.165.158.216,00	56.779.301.992,00	69,96	24.385.856.224,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(264.121.226.129,00)	(162.713.736.790,09)	61,61	(101.407.489.338,91)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
3.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
3.1.01.05.	Penghematan Belanja	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
3.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
3.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
	PEMBIAYAAN NETTO	264.121.226.129,00	178.730.960.265,90	67,67	85.390.265.863,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	16.017.223.475,81	-	(16.017.223.475,81)

Teluk Kuantan, 31 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM